



Reformasi Subsidi LPG di Indonesia:

Pembelajaran dari
pengalaman internasional

LAPORAN GSI



© 2021 International Institute for Sustainable Development
Diterbitkan oleh International Institute for Sustainable Development
Publikasi ini berada di bawah lisensi berdasarkan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

International Institute for Sustainable Development

The International Institute for Sustainable Development (IISD) adalah organisasi think-tank independen yang telah memenangkan berbagai penghargaan. IISD bekerja untuk mempercepat pencapaian solusi untuk mewujudkan iklim yang stabil, pengelolaan sumber daya berkelanjutan, dan ekonomi yang adil. Kerja-kerja kami menginspirasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan tindakan yang lebih bermakna untuk membantu masyarakat dan bumi untuk tetap hidup berkelanjutan. Kami menunjukkan bahwa ada banyak hal yang dapat dicapai jika pemerintah, bisnis, organisasi nirlaba, dan masyarakat bersatu dan bekerja sama. IISD memiliki lebih dari 120 staf dan 150 associate dan konsultan dari seluruh dunia dan dari berbagai disiplin. Pekerjaan kami telah membawa dampak pada masyarakat di hampir 100 negara.

IISD terdaftar sebagai organisasi amal di Kanada, dan telah berstatus 501 (c) di Amerika Serikat. IISD menerima pendanaan operasional utamanya dari Provinsi Manitoba. Institut ini juga menerima pendanaan proyek dari berbagai pemerintahan di dalam dan luar Kanada, lembaga-lembaga PBB, yayasan, sektor swasta, dan perorangan

Global Subsidies Initiative

IISD Global Subsidies Initiative (GSI) mendukung berbagai proses internasional, pemerintah pusat dan organisasi masyarakat sipil untuk menyelaraskan subsidi dengan pembangunan berkelanjutan. GSI melakukan hal ini dengan cara mempromosikan transparansi tentang sifat dan ukuran subsidi; mengevaluasi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari subsidi; dan, bilamana dibutuhkan, memberikan masukan tentang cara terbaik mereformasi subsidi yang tidak efisien dan boros sumber daya. GSI berkantor pusat di Jenewa, Swiss, dan bekerja dengan berbagai mitra yang berada di seluruh dunia. Pada pendana utama GSI mencakup Pemerintah Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Swiss dan Inggris, serta KR Foundation.

Reformasi Subsidi LPG di Indonesia: Pembelajaran dari pengalaman internasional

Mei 2021

Disusun oleh Jonas Kuehl, Martha Maulidia, Kavya Bajaj, dan Silke Boelts

Kantor Pusat

111 Lombard Avenue,
Suite 325
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 0T4

Tel: +1 (204) 958-7700

Website: www.iisd.org

Twitter: [@IISD_news](https://twitter.com/IISD_news)

Global Subsidies Initiative

International Environment
House 2,
7-9 chemin de Balaxert
1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland
Canada R3B 0T4

Tel: +1 (204) 958-7700

Website: www.iisd.org/gsi

Twitter: [@globalsubsidies](https://twitter.com/globalsubsidies)



Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada para pengkaji sejawat (peer reviewer) yang komentar-komentarnya sangat membantu penyempurnaan draft awal dari makalah ini:

- Della Y.A. Temenggung, Deputy Director, Advisory & Policy, Prospera
- Rullan Rinaldi, Senior Coordinator (Private Sector Development and Economic Inclusion), Prospera
- Astrid Dita, Senior Budget Policy Advisor, Prospera



Ringkasan Eksekutif

Subsidi LPG Indonesia tidak hanya menguras APBN secara signifikan, namun juga tidak efisien dari sudut pandang keadilan sosial, karena sebagian besar subsidi tersebut justru dinikmati kelompok kaya. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia berencana mengubah sistem subsidi LPG menjadi subsidi tertarget melalui sistem distribusi tertutup untuk membatasi akses subsidi hanya untuk kelompok miskin. Sebelumnya, sejumlah skema sempat diusulkan, antara lain oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang berhasil merancang skema uji coba di mana kelayakan calon penerima manfaat subsidi LPG diverifikasi menggunakan teknologi biometrik. Meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk mengubah kebijakan yang ada, pelaksanaan sistem tertutup ini harus tertunda berulang kali selama beberapa tahun terakhir, yang antara lain disebabkan situasi sulit akibat krisis COVID-19. Pada kenyataannya, perekonomian Indonesia memang berkontraksi lebih dari 2%, sementara defisit anggaran meningkat lebih dari 6%. Kondisi defisit ini diperkirakan akan tetap mengkhawatirkan pada tahun 2021.

Namun, beberapa negara berkembang lainnya telah menunjukkan bahwa situasi krisis tidak harus menyebabkan penundaan reformasi kebijakan yang direncanakan. Krisis justru dapat memberikan peluang untuk mereformasi harga bahan bakar fosil dan memperkuat sistem kesejahteraan suatu negara. India, misalnya, meningkatkan pajak bahan bakar selama krisis COVID-19 untuk memperoleh pendapatan tambahan serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok miskin dengan menyalurkan tiga LPG tabung gratis. Di wilayah lain, Meksiko menambahkan komponen energi ke dalam program bantuan tunai bersyaratnya pada masa Resesi Besar 2008/09 untuk memastikan akses energi bagi kelompok miskin tetap tersedia secara berkesinambungan.

Inti dari laporan ini adalah tiga studi kasus dan analisis atas pembelajaran dari pengalaman masing-masing negara tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, kami mengajukan empat rekomendasi berikut bagi reformasi subsidi LPG di Indonesia:

1. Indonesia harus menghentikan subsidi LPG dari yang sebelumnya dinikmati kelompok kaya, lalu menggunakan dana yang berhasil dihemat untuk membantu kelompok yang paling terkena dampak krisis.
2. Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan proses pengumpulan data yang kuat untuk menjamin seluruh penerima manfaat yang berhak tetap dapat mengakses LPG bersubsidi.
3. Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan rencana dukungan publik yang kuat agar dapat melibatkan kelompok politik dan kelompok berpengaruh lainnya, serta mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan rencana pemberian kompensasi yang mungkin akan dilaksanakan.
4. Indonesia harus memanfaatkan momentum turunnya harga minyak dunia yang dapat menjadi penyangga terhadap kemungkinan guncangan ekonomi di masa depan serta membantu mengurangi penolakan terhadap reformasi subsidi.



Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| 1.0 Pendahuluan..... | 1 |
| 2.0 Subsidi LPG di Indonesia..... | 3 |
| 2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Subsidi LPG | 3 |
| 2.2 Permasalahan Subsidi LPG | 3 |
| 2.3 Upaya Mengurangi Belanja Subsidi LPG..... | 5 |
| 3.0 Rencana Reformasi Subsidi LPG Saat Ini..... | 6 |
| 3.1 Penargetan Subsidi LPG | 6 |
| 3.2 Rencana Usulan TNP2K..... | 6 |
| 3.3 Manfaat Subsidi LPG Tertarget..... | 7 |
| 4.0 Reformasi Subsidi LPG dan Dampaknya pada Perubahan Iklim..... | 8 |
| 4.1 Perbandingan Biaya Memasak dengan LPG Bersubsidi, LPG Non-Subsidi, dan Listrik ... | 8 |
| 4.2 Emisi Gas Rumah Kaca yang Disebabkan Memasak dengan LPG dan Listrik..... | 8 |
| 4.3 Biaya Tambahan Terkait dengan Peralihan Kompor Induksi Listrik..... | 9 |
| 4.4 Promosi Memasak Menggunakan Listrik oleh Pemerintah Indonesia dan PLN..... | 10 |
| 5.0 Studi Kasus Internasional..... | 11 |
| 5.1 Studi Kasus India: Menaikkan pajak bahan bakar sebagai respons terhadap krisis COVID-19 | 11 |
| 5.1.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Anggaran Publik India | 11 |
| 5.1.2 Komposisi Harga Bahan Bakar India | 11 |
| 5.1.3 Meningkatkan Pajak Bahan Bakar untuk Mengamankan Belanja Fiskal..... | 12 |
| 5.1.4 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Harga Ritel | 13 |
| 5.1.5 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Masyarakat..... | 14 |
| 5.1.6 Pembelajaran..... | 15 |
| 5.2 Studi Kasus India: Skema perlindungan sosial baru untuk LPG sebagai respons terhadap krisis COVID-19 | 16 |
| 5.2.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Masyarakat Miskin dan Rentan Lainnya di India. | 16 |
| 5.2.2 Program-program Perlindungan Sosial India untuk Menggunakan LPG | 16 |
| 5.2.3 Upaya Perlindungan Sosial LPG Baru sebagai Respons terhadap COVID-19 | 17 |
| 5.2.4 Pembiayaan Upaya Perlindungan Sosial Baru | 18 |
| 5.2.5 Pembelajaran..... | 19 |



| | |
|--|-----------|
| 5.3 Studi Kasus Meksiko: Memperluas program perlindungan sosial yang ada sebagai respons terhadap krisis ekonomi global 2008/09..... | 19 |
| 5.3.1 Dampak Krisis Ekonomi Global 2008/09 pada Perekonomian Meksiko..... | 19 |
| 5.3.2 Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal (<i>Oportunidades</i>) sebagai Perlindungan Sosial..... | 20 |
| 5.3.3 Memperluas Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal dengan Komponen Energi untuk Melindungi Kelompok Miskin dari Harga Minyak yang Tinggi..... | 20 |
| 5.3.4 Dampak Komponen Energi..... | 21 |
| 5.3.5 Pembelajaran..... | 22 |
| 6.0 Kesimpulan..... | 24 |
| Referensi..... | 26 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Pertumbuhan PDB, defisit, dan belanja subsidi LPG Indonesia antara tahun 2016 hingga 2021..... | 2 |
| Gambar 2. Volume LPG bersubsidi dan proporsi produksi domestik dan impor dalam total LPG yang digunakan antara tahun 2009 dan 2021..... | 4 |
| Gambar 3. Distribusi manfaat subsidi LPG 3kg ² | 5 |
| Gambar 4. Perubahan komponen harga bensin di Delhi antara bulan Januari hingga September 2020..... | 13 |
| Gambar 5. Perubahan komponen harga solar di Delhi antara bulan Januari hingga September 2020..... | 14 |
| Gambar 6. Belanja India untuk DBT-L dan evolusi harga minyak mentah di <i>India Basket</i> antara tahun 2015 dan 2021..... | 18 |
| Gambar 7. Perubahan angka kemiskinan dan harga energi antara tahun 2006 dan 2010..... | 22 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Biaya tambahan yang ditimbulkan peralihan ke kompor induksi listrik..... | 10 |
|---|----|



Singkatan dan Akronim

| | |
|----------------------|--|
| BJP | Bharaitya Janata Party (Partai politik terbesar di India, partai dari Perdana Menteri Narendra Modi) |
| BUMN | Badan Usaha Milik Negara |
| CBIC | Central Board of Indirect Taxes and Customs (Dewan Pusat Pajak Tidak Langsung dan Bea) |
| CONEVAL | National Council for the Evaluation of Social Development Policy – Mexico (Dewan Nasional untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial – Meksiko) |
| DBT | Direct Benefit Transfer (Bantuan Langsung Tunai) |
| DBT-L | Direct Benefit Transfer for LPG (Bantuan Langsung Tunai untuk LPG) |
| DME | Dimetil Eter (Batu bara yang digasifikasi) |
| ESDM | Energi dan Sumber Daya |
| GHG | Greenhouse Gas (Gas Rumah Kaca) |
| IISD | International Institute of Sustainable Development (Institut Internasional Pembangunan Berkelanjutan) |
| INR | Indian Rupee (mata uang India) |
| LPG | Liquefied Petroleum Gas (Elpiji; Gas minyak cair) |
| NDC | Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional) |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) |
| OMC | Oil Marketing Companies (Perusahaan Pemasaran Minyak Bumi) |
| OPEC | Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi) |
| Oportunidades | Program bantuan sosial dari Pemerintah Meksiko, didirikan pada tahun 2002 |
| PDB | Produk Domestik Bruto |
| PLN | Perusahaan Listrik Negara |
| PMUY | Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (Skema Subsidi Perdana Menteri) |
| PJI | Pajak Jalan dan Infrastruktur |
| PPN | Pajak Pertambahan Nilai |
| PROSPERA | Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| TNP2K | Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |



1.0 Pendahuluan

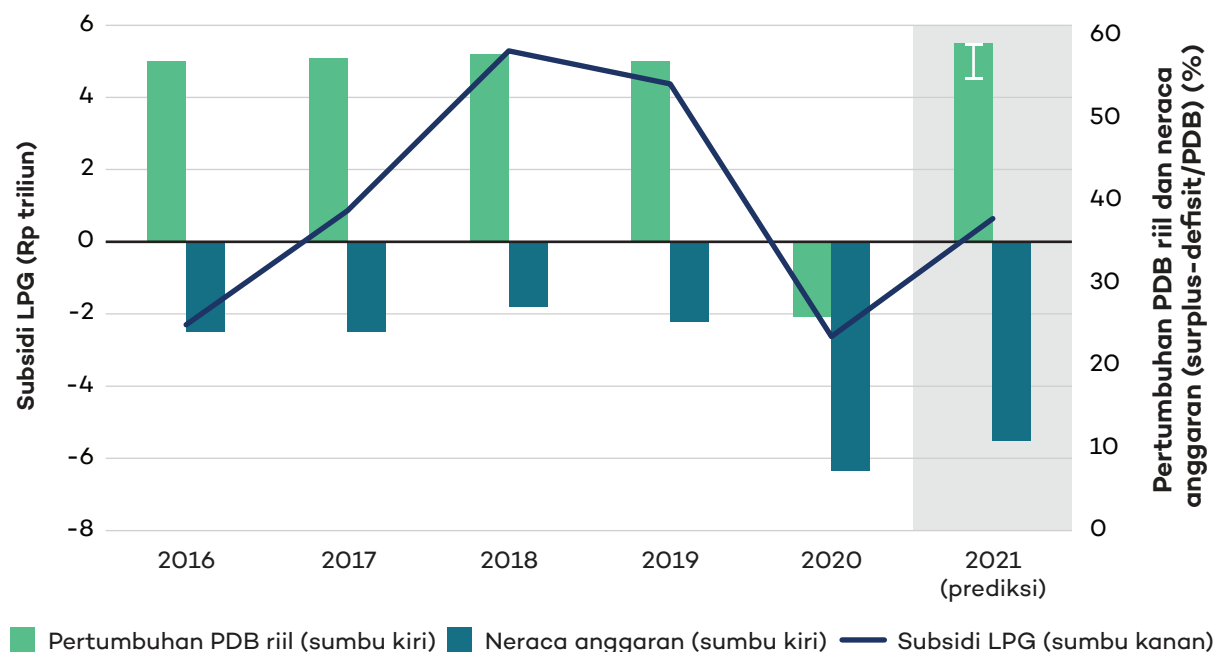
Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia terguncang cukup parah akibat pandemi COVID-19. Pada bulan Maret, Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meredam penyebaran penyakit ini setelah kasus-kasus awal terkonfirmasi (International Monetary Fund, 2020). Kondisi ini sangat memperlambat berbagai kegiatan ekonomi karena upaya-upaya peredaman ini mencakup larangan perjalanan, penutupan sekolah, serta pembatasan acara publik. Karena negara-negara lain juga menutup ekonominya, permintaan global atas produk-produk Indonesia khususnya produk energi pun turut terkena dampak negatif. Sebagai contoh, ekspor batu bara Indonesia lebih rendah sebesar 32% pada bulan April 2020 dan 41% lebih rendah pada bulan Mei 2020 dibandingkan satu tahun sebelumnya (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], 2020e).

Penurunan konsumsi domestik dan ekspor telah berdampak negatif pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang turun hingga mencapai -2,07% pada tahun 2020 dari pertumbuhan yang sebelumnya stabil pada 5% antara tahun 2016 dan 2019 (Kementerian Keuangan, 2020; Nuryanto, 2021). Selain itu, neraca anggaran Indonesia juga telah terkena dampak hebat akibat penurunan penerimaan pajak dan peningkatan kebutuhan belanja. Menurut seorang pejabat Kementerian Keuangan, penerimaan pajak diperkirakan berkontraksi hampir sebesar 20% pada tahun 2020, padahal pengeluaran pemerintah setidaknya mencapai US\$6,78 miliar (hingga Februari 2021) untuk mendukung sektor energi domestik, terutama bahan bakar fosil (Energy Policy Tracker, 2020; Nuryanto, 2021). Hal ini menyebabkan defisit anggaran melebar dari sekitar -2% PDB antara tahun 2016 dan 2019 menjadi -6,34% PDB pada tahun 2020 (Kementerian Keuangan, 2020; Nuryanto, 2021). Akibatnya, lembaga pemeringkat Standard and Poor's menurunkan peringkat kredit Indonesia yang sebelumnya stabil atau BBB menjadi negatif pada bulan April 2020 (Haroon, 2020).

Subsidi energi memberikan tekanan besar terhadap APBN. Pada tahun 2019, belanja subsidi energi mencapai Rp136,9 triliun (US\$9,7 miliar) atau sekitar 6% dari total belanja negara (Kementerian Keuangan, 2020). Subsidi LPG sebesar Rp54 triliun atau sekitar 40% dari subsidi energi total pada tahun 2019 selalu meningkat dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 1). Hal ini menyebabkan subsidi LPG menjadi komponen terbesar dari seluruh subsidi energi melebihi subsidi listrik dan bahan bakar. Permintaan atas LPG bersubsidi sempat meningkat pada tahun 2020 (yaitu sebesar 11% pada bulan April [Hartomo, 2020]) sebagai akibat masyarakat yang masih berdiam di rumah selama masa pembatasan kegiatan. Walaupun demikian, secara keseluruhan belanja subsidi LPG pemerintah turun menjadi Rp23,5 triliun (US\$1,6 miliar) pada tahun 2020 akibat rendahnya harga minyak dan perubahan nilai tukar. Namun, proyeksi tahun 2021 sebesar Rp37,8 triliun (US\$2,6 miliar) menunjukkan bahwa subsidi LPG akan meningkat kembali seiring dengan pemulihan harga minyak. Selain memiliki dampak negatif pada anggaran publik, distribusi subsidi LPG juga tidak efisien karena tidak memiliki mekanisme penargetan.



Gambar 1. Pertumbuhan PDB, defisit, dan belanja subsidi LPG Indonesia antara tahun 2016 hingga 2021



Catatan: Nilai untuk 2021 adalah prediksi.

Sumber: Kementerian Keuangan, 2020; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), komunikasi pribadi, 2020.

Terlepas dari sensitifnya isu ini, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman baik dalam mereformasi subsidi energi. Dengan didukung oleh harga minyak internasional yang rendah, Pemerintah Indonesia hampir sepenuhnya menghapus subsidi bensin dan subsidi solar tetap per liter pada tahun 2014. Kebijakan ini menambah ruang anggaran sebesar Rp211 triliun (US\$15,6 miliar) yang dialokasikan untuk tambahan belanja transfer ke daerah dan desa, program khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan, serta suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya untuk investasi di bidang infrastruktur (Pradipto et al., 2016).

Reformasi subsidi LPG perlu merujuk pada keberhasilan tersebut dan membantu menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung prioritas lainnya, termasuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Mengingat penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin telah meningkat sebesar 1,63 juta orang sehingga membuat jumlah totalnya menjadi 26 juta orang antara bulan September 2019 hingga Maret 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020), subsidi LPG tepat sasaran akan menghasilkan penghematan yang signifikan, dengan tetap menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.



2.0 Subsidi LPG di Indonesia

2.1 Latar Belakang Pelaksanaan Subsidi LPG

Subsidi LPG diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 sebagai bagian dari Program Konversi Minyak Tanah ke LPG (Toft et al., 2016). Motivasi utama dalam melaksanakan program ini adalah untuk mengurangi subsidi minyak tanah, yang telah meningkat lebih dari empat kali lipat antara tahun 2001 dan 2008, dan beralih ke bahan bakar bersih dengan polusi udara dalam ruangan yang lebih rendah (Budya & Yasir Arofah, 2011; Pemerintah Indonesia, 2009). Karena harga LPG (per keluaran energi) lebih rendah dan distribusinya relatif mudah, Pemerintah Indonesia mendorong substitusi minyak tanah dengan cara menyediakan paket perdana LPG gratis dan harga subsidi untuk isi ulang (Budya & Yasir Arofah, 2011). Pada dasarnya program ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minyak tanah dengan tetap melindungi konsumen dari guncangan ekonomi, mengingat upaya sebelumnya untuk mengurangi konsumsi dengan meningkatkan harga minyak tanah pernah mengakibatkan kerusuhan serius (Beaton & Lontoh, 2010).

Secara keseluruhan, program ini berhasil menurunkan penggunaan minyak tanah sebesar lebih dari 93% antara tahun 2008 hingga 2016 (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019). Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), konsumsi LPG meningkat signifikan, dan pada tahun 2015 LPG telah menjadi bahan bakar memasak utama bagi 69% rumah tangga, dari yang semula hanya 11% pada tahun 2007 (Kusumawardhani et al., 2017).

2.2 Permasalahan Subsidi LPG

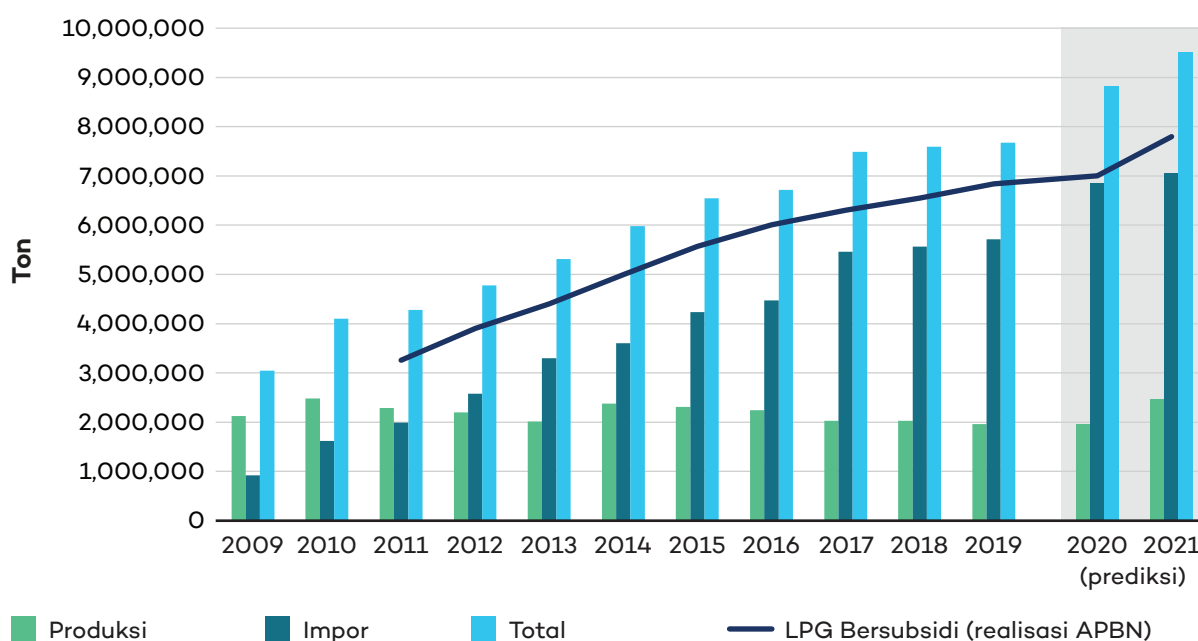
Selama bertahun-tahun, belanja subsidi LPG menjadi semakin mahal karena meningkatnya permintaan. LPG di Indonesia dijual dalam tiga ukuran tabung: 3kg, 5,5kg, dan 12kg (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). LPG tabung 3kg disubsidi dan dijual di harga tetap sejak tahun 2008, namun LPG 5,5kg dan 12kg tidak disubsidi, sehingga harganya terus berubah-ubah dari waktu ke waktu mengikuti harga pasar internasional (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Hal ini menyebabkan naiknya kesenjangan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi, yang mendorong lebih banyak konsumen membeli LPG tabung 3kg. Meskipun Undang-undang Energi (2007) menetapkan bahwa subsidi energi hanya diperuntukkan bagi kelompok miskin dan kelompok rentan demi meningkatkan akses mereka kepada energi, pada kenyataannya LPG tabung 3kg bersubsidi dijual bebas dan hingga saat ini penjualannya tidak dibatasi hanya bagi kelompok miskin. Akibatnya, mayoritas rumah tangga yang tergolong berpendapatan tinggi terus membeli LPG tabung 3kg bersubsidi (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, volume LPG bersubsidi yang terjual terus meningkat sejak awal penerapan subsidi pada tahun 2009, dan subsidi LPG menjadi belanja publik dengan nilai sebesar Rp54 triliun (US\$3,8 miliar) pada tahun 2019 (BPK, 2020). Sebelum pandemi COVID-19, konsumsi LPG bersubsidi diproyeksikan akan semakin



meningkat hingga mencapai 10 miliar kg pada tahun 2023, atau senilai Rp89 triliun¹ (US\$6,1 miliar), dengan asumsi harga tetap konstan (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Karena permintaan LPG semakin banyak dipenuhi melalui impor (Gambar 2) -sekitar 75% pada tahun 2019- subsidi konsumsi LPG juga berkontribusi semakin besar menyebabkan defisit neraca perdagangan Indonesia serta memberikan risiko tambahan kepada APBN (ESDM, 2020a, 2020c).

Gambar 2. Volume LPG bersubsidi dan proporsi produksi domestik dan impor dalam total LPG yang digunakan antara tahun 2009 dan 2021



Catatan: Nilai untuk tahun 2020 dan 2021 adalah prediksi.

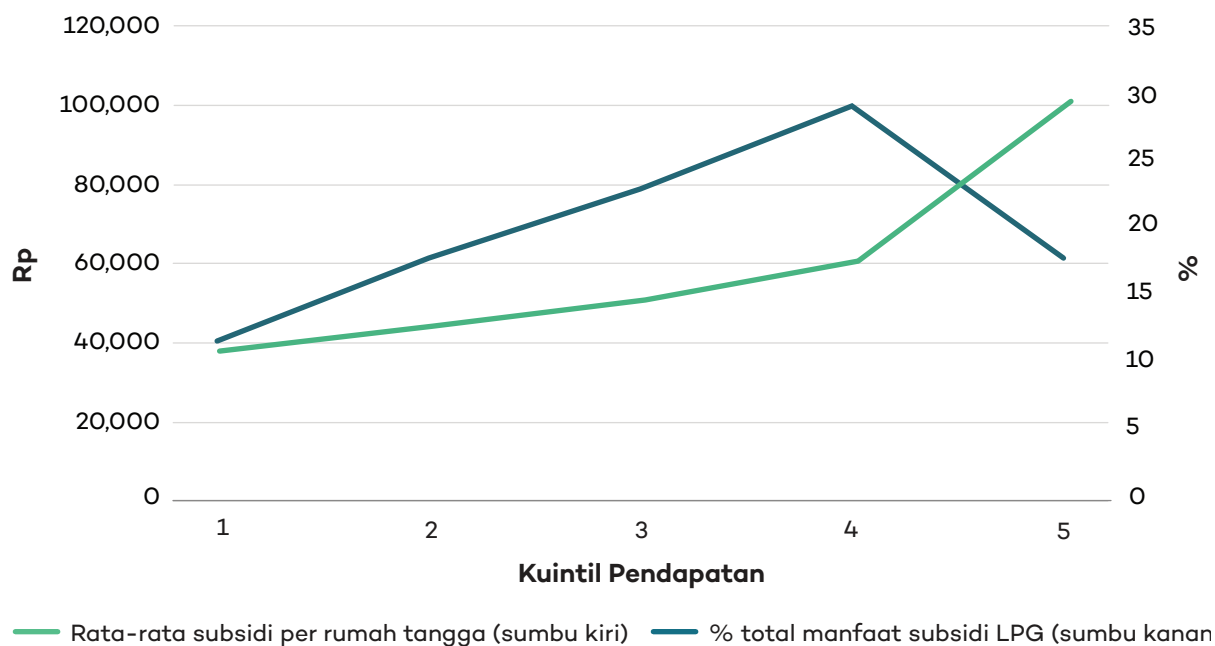
Sumber: Kementerian ESDM, 2020a, 2020c

Dari sini dapat terlihat bahwa subsidi LPG bersifat regresif, dan karenanya tidak membantu mengurangi ketimpangan. Menurut sebuah penelitian tentang distribusi subsidi LPG (Kusumawardhani et al., 2017), hanya sekitar 39% pengguna LPG tabung 3kg yang termasuk ke dalam kategori 40% rumah tangga berpendapatan terendah, meskipun UU menetapkan bahwa seharusnya justru rumah tangga berpendapatan terendahlah yang menjadi penerima utama LPG bersubsidi. Selain itu, rumah tangga kaya mengonsumsi lebih banyak LPG secara rata-rata, dan karenanya memperoleh manfaat lebih tinggi dari subsidi total per rumah tangga (Gambar 3). Lebih lanjut, di wilayah perdesaan di mana mayoritas rumah tangga miskin berada, akses terhadap LPG bersubsidi berharga resmi sering kali terbatas, disebabkan adanya biaya tambahan untuk penyalur tidak resmi dan transportasi. Akibatnya, hanya 30% dari total subsidi LPG yang diterima orang-orang yang membutuhkannya (yaitu 40% rumah tangga berpendapatan terendah); rumah tangga yang lebih kaya justru menikmati subsidi yang lebih banyak, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 (Kusumawardhani et al., 2017).

¹ Dengan asumsi harga tetap konstan.



Gambar 3. Distribusi manfaat subsidi LPG 3kg²



Sumber: Kusumawardhani et al., 2017.

2.3 Upaya Mengurangi Belanja Subsidi LPG

PT Pertamina, BUMN di bidang migas telah mencoba sejumlah cara untuk mendorong konsumen mampu untuk mengonsumsi LPG non-subsidi. Upaya tersebut mencakup penjualan LPG non-subsidi dalam tabung 5,5kg pada awal tahun 2015 dan tabung 3kg pada tahun 2017, serta memberikan diskon khusus (Maulana, 2018; Prakoso, 2015; Prasongko, 2017). Namun, upaya-upaya tersebut tidak efektif karena tidak mengatasi masalah mendasarnya, yaitu ketimpangan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi tanpa membatasi akses kepada LPG bersubsidi, yang menyebabkan terjadinya salah sasaran. Pemerintah juga menguji coba gasifikasi batu bara (*dimetil eter [DME]*) dan memperluas jaringan distribusi LNG melalui program jaringan gas perkotaan, namun masih belum mencapai skala yang memadai dan karenanya masih menjadi solusi jangka panjang (ESDM, 2020d). Pemerintah telah menunjukkan niat untuk membatasi akses LPG bersubsidi hanya kepada kelompok tertentu pada beberapa tahun terakhir, namun peraturan yang terkait masih belum ditetapkan. Beberapa waktu lalu, pemerintah berencana melaksanakan sistem tertutup di mana penerima manfaat akan menerima LPG tabung bersubsidi dalam jumlah terbatas pada pertengahan tahun 2020, namun rencana ini ditunda karena krisis COVID-19 (Philemon, 2020).

² Jumlah total rumah tangga dalam kuintil pendapatan 5 sangat rendah, sehingga proporsi manfaat subsidi LPG total yang diterimanya lebih kecil dibandingkan yang diterima kuintil pendapatan 3 dan 4; padahal, subsidi rata-rata per rumah tangga justru tertinggi bagi rumah tangga pada kuintil pendapatan 5.



3.0 Rencana Reformasi Subsidi LPG Saat Ini

3.1 Penargetan Subsidi LPG

Pada tahun 2019, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan dan Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (PROSPERA) melakukan penilaian atas efektivitas sistem subsidi yang sedang berlaku. Lalu sebagai hasilnya mereka merekomendasikan penghapusan subsidi harga saat itu dan melindungi kelompok rentan melalui bantuan langsung tunai (BLT). Selain itu, penelitian tersebut menyoroti adanya kebutuhan atas beberapa elemen berikut:

- Bantuan yang memadai untuk mengompensasi penurunan daya beli.
- Penentuan penerima BLT sasaran yang didasarkan pada proses pengumpulan data yang valid.
- Pengujian fungsi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung perubahan kebijakan.

Beberapa skema telah diusulkan untuk melaksanakan sistem transfer langsung ini untuk subsidi LPG. Menurut ESDM, salah satu opsi yang telah diuji di beberapa lokasi adalah penggunaan kartu dengan kode batang yang terhubung langsung dengan rekening bank kelompok penerima manfaat (Simatupang, 2020). Ketika membeli LPG tabung 3kg, kode batang otomatis akan terekam, dan subsidi akan ditransfer langsung ke rekening bank pemegang kartu.

3.2 Rencana Usulan TNP2K

Sementara itu, TNP2K mengembangkan sebuah skema untuk memverifikasi kelayakan penerima melalui mekanisme biometrik wajah (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Berdasarkan sistem ini, penerima manfaat terdaftar dapat mendatangi agen atau toko, di mana data biometriknya dapat diverifikasi dengan aplikasi ponsel pintar LinkAja - salah satu jaringan antarbank Indonesia - dengan mengambil foto penerima manfaat. Begitu Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dimasukkan, data pribadi dan saldo bantuan terbaru akan terbuka, dan jika saldo masih mencukupi, pembayaran dapat dilakukan, dan tabung LPG kosong dapat diganti dengan yang baru.

Untuk memastikan subsidi hanya disalurkan ke keluarga berstatus sosial-ekonomi 40% terbawah, TNP2K menggunakan data subsidi listrik pemerintah untuk mengidentifikasi sekitar 30 juta keluarga yang berhak menerima bantuan. Terdapat perbedaan sekitar 20 juta rumah tangga lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penerima subsidi LPG tabung 3kg saat ini (Citra, 2020; TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Setiap rumah tangga yang memenuhi kelayakan akan menerima transfer bernilai tiga LPG tabung 3kg per bulan, dan setiap usaha mikro akan menerima bantuan setara sembilan tabung, sementara keluarga nelayan dan petani akan menerima setara dengan 12 tabung berdasarkan perkiraan kebutuhan konsumsi dasar minimal (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020).



Untuk menguji sistem biometrik wajah, sidik jari, maupun teknologi voucher elektronik, TNP2K melakukan uji coba pertama sejak bulan Desember 2018 hingga Mei 2019 di tujuh daerah dengan melibatkan lebih dari 14.000 rumah tangga (Wicaksono, 2019). Hasil proyek uji coba tersebut menunjukkan bahwa proses transaksi dapat dilakukan secara mulus dan cepat, namun sebagian penjual LPG masih belum siap melakukan proses transaksi tersebut dan memerlukan pelatihan tambahan. Meskipun proses verifikasi wajah berjalan lancar tanpa masalah, metode verifikasi sidik jari rupanya memerlukan waktu lebih lama, dan metode verifikasi kode voucher juga sedikit terhambat, karena sebagian penerima manfaat lupa nomor identifikasi pribadi (PIN) mereka, mendaftarkan nomor telepon yang salah, atau mengalami masalah jaringan ponsel. Meskipun terdapat berbagai potensi isu terkait skalabilitas teknologi tersebut dan pemanfaatannya di berbagai wilayah terpencil jika infrastruktur pendukung kurang tersedia, TNP2K mendukung penggunaan teknologi biometrik wajah, yang juga menghemat banyak biaya seperti biaya pencetakan dan distribusi (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Berdasarkan temuan dari proyek percobaan pertama, teknologi ini kemudian disempurnakan melalui proyek percobaan kedua di tiga kabupaten antara bulan September hingga November 2019 (Citra, 2020).

3.3 Manfaat Subsidi LPG Tertarget

Dalam studi yang dilakukan pada tahun 2019, BKF dan PROSPERA juga menganalisis dampak perubahan skema subsidi LPG tabung 3kg. Studi ini menemukan penghapusan subsidi LPG tanpa kompensasi akan meningkatkan inflasi sebesar 1,32 poin persen, yang akan meningkatkan kemiskinan nasional sebesar 0,47% atau 10,29% dan ketimpangan (koefisien Gini) sebesar 0,002 hingga 0,391 (Badan Kebijakan Fiskal, 2019; Joewono, 2020). Sebaliknya, subsidi tertarget bagi rumah tangga dengan status sosial-ekonomi terendah diproyeksikan akan secara langsung menutup hilangnya daya beli serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dibandingkan dengan sistem saat ini. Namun sejauh mana dampak kebijakan ini akan bergantung pada jumlah subsidi yang diberikan. Bantuan langsung sebesar Rp45.000 per rumah tangga per bulan akan membantu mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,13% hingga 9,68% dan ketimpangan sebesar 0,002 hingga 0,387, sementara bantuan langsung sebesar Rp60.000 per rumah tangga per bulan akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,36% hingga 9,46% dan ketimpangan dari 0,003 menjadi 0,386.

Pada saat yang sama, reformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3kg dengan cara ini juga akan membawa dampak positif pada beban fiskal publik. Menurut rencana yang diusulkan TNP2K, pengurangan belanja pemerintah untuk subsidi LPG dapat berkisar antara 70% (jika hanya keluarga yang berhak yang dimasukkan ke dalam skema tersebut) hingga 40% (jika keluarga yang berhak, usaha mikro, dan keluarga nelayan dan petani turut dimasukkan)³ (TNP2K, komunikasi pribadi, 2020). Serupa dengan pengurangan subsidi bahan bakar pada tahun 2014/15, dana yang dihemat dapat dibelanjakan untuk tujuan yang lebih produktif, khususnya untuk pemulihan COVID-19.

Analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai dampak pada rumah tangga lain yang tidak termasuk ke dalam kategori dua desil terbawah, dan juga untuk memahami pandangan masyarakat tentang berbagai opsi reformasi yang ada.

³ Perhitungan ini didasarkan pada alokasi anggaran awal untuk tahun 2020 (sekitar Rp49,4 triliun).



4.0 Reformasi Subsidi LPG dan Dampaknya pada Perubahan Iklim

Reformasi subsidi LPG akan menyebabkan kenaikan harga LPG bagi banyak rumah tangga, yang akan menjadi insentif bagi rumah-rumah tangga tersebut untuk beralih menggunakan kompor listrik untuk memasak. Selain itu, Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk mendukung peralihan dari LPG ke kompor memasak listrik untuk keluarga berpendapatan menengah dan tinggi sebagai cara untuk menghemat sumber daya pemerintah yang dibelanjakan untuk subsidi LPG. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia berbasis bahan bakar fosil, dengan batu bara memegang peranan yang sangat penting, peralihan ini berisiko membawa dampak negatif pada emisi karbon dioksida Indonesia. Sebaliknya, kelompok rentan akan terus menerima LPG bersubsidi setelah reformasi, dan karenanya mereka diharapkan tidak akan mencari alternatif yang membahayakan, seperti biomassa yang menyebabkan polusi udara dalam ruangan yang tinggi.

4.1 Perbandingan Biaya Memasak dengan LPG Bersubsidi, LPG Non-Subsidi, dan Listrik

Berdasarkan penargetan yang disarankan oleh TNP2K, sekitar 20 juta rumah tangga tidak akan mampu lagi mengakses LPG bersubsidi, dan harus membeli LPG di harga yang mencerminkan harga pasar internasional. Pada akhirnya, biaya memasak dengan LPG akan meningkat, yang akan mendorong kelompok rumah tangga ini mencari alternatif lain seperti kompor induksi listrik. Sebagai contoh, rumah tangga dengan daya 1.300 VA atau lebih dapat menghemat Rp46.204 (US\$3,17) per bulan ketika menggunakan LPG bersubsidi dibandingkan jika memasak menggunakan kompor induksi listrik, namun mereka harus menghabiskan Rp11.746 (US\$ 0,80) lebih banyak jika mereka diwajibkan membeli LPG non-subsidi⁴ (Pranadji et al., 2010).

4.2 Emisi Gas Rumah Kaca yang Disebabkan Memasak dengan LPG dan Listrik

Mengingat bauran energi Indonesia masih didominasi oleh batu bara⁵ (ESDM, 2020b) dan tidak mungkin berubah dalam waktu dekat (Perusahaan Listrik Negara [PLN], 2020), peralihan ke kompor induksi listrik dapat menciptakan tantangan dalam hal emisi gas rumah kaca (GRK), yang dapat mengganggu rencana Indonesia untuk mencapai sasaran pengurangan GRK pada tahun 2030 sebagaimana telah dinyatakan dalam Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) Indonesia. Meskipun efisiensi kompor LPG lebih rendah

⁴ Hal ini didasarkan pada konsumsi rata-rata bulanan untuk memasak, yaitu sebesar 11,4 kg per LPG dan 87,2 kWh per rumah tangga.

⁵ Pada bulan Juni 2020, bauran bahan bakar listrik Indonesia berdasarkan kapasitas terpasang adalah sebagai berikut: batu bara (49,63%), gas dan hibrid (29%), minyak bahan bakar (6,74%), dan energi terbarukan (14,7%).



(55% dibandingkan kompor induksi⁶) (Dewan Energi Nasional & ESDM, 2020), memasak dengan LPG mengakibatkan emisi karbon dioksida tahunan sebesar 0,408 ton setara karbon dioksida (tCO₂e) per rumah tangga, sementara memasak dengan kompor induksi listrik menyebabkan dua kali lipat jumlah ini (0,855 tCO₂e per tahun).⁷ Peralihan dari LPG ke kompor induksi listrik karenanya akan mengakibatkan kenaikan tahunan sebesar 0,447 tCO₂e per rumah tangga. Karena batu bara akan tetap menjadi sumber pembangkitan listrik dominan bagi Indonesia, dan mengingat Indonesia kemungkinan tidak dapat memenuhi target energi terbarukannya, perbedaan antara emisi GRK ketika memasak menggunakan LPG dan listrik dapat diperkirakan akan tetap konstan selama satu dekade ke depan, karena faktor emisi sistem jaringan listrik kemungkinan akan tetap konstan atau bahkan meningkat (PLN, 2019). Jika sekitar 20 juta rumah tangga yang kehilangan akses ke LPG bersubsidi segera beralih menggunakan listrik untuk memasak, akan terjadi tambahan sebesar 0,0089 GtCO₂e, yang dapat dianggap kecil dibandingkan estimasi total emisi GRK Indonesia yang sebesar 1,8 GtCO₂e pada tahun 2020 (Climate Analytics & Climate Action Tracker, 2020).

4.3 Biaya Tambahan Terkait dengan Peralihan Kompor Induksi Listrik

Rumah tangga yang beralih memasak dengan kompor induksi listrik harus membayar biaya di muka relatif tinggi, termasuk untuk pembelian unit kompor dan alat masak feromagnetik, kabel, dan juga biaya administratif untuk sertifikasi. Saat ini, hanya sekitar 4,5 juta rumah tangga yang memiliki daya listrik yang memadai untuk menggunakan kompor induksi listrik (yaitu di atas 2.200 VA). Sekitar 11,5 juta rumah tangga berada satu tingkat di bawah daya listrik tersebut (1.300 VA) (Dewan Energi Nasional & ESDM, 2020), dan karenanya juga harus membayar biaya penambahan daya jika mereka ingin memasak menggunakan listrik. Penjabaran biaya detail pada Tabel 1 mencapai hampir Rp5 juta (US\$ 342). Karena pendapatan bulanan kelas menengah bawah berada di bawah Rp7,5 juta (US\$514) dan kelas menengah di bawah Rp25 juta (US\$1.714) per keluarga (Miranda, 2020), biaya-biaya ini dapat menjadi beban yang besar dan akan membatasi kemampuan rumah tangga dari kedua kelompok pendapatan ini untuk beralih ke kompor listrik.

⁶ Kementerian ESDM memperkirakan bahwa kompor LPG dan kompor induksi memiliki efisiensi termal rata-rata sebesar 40% dan 85%. Dewan Energi Nasional dan ESDM (2020) menggunakan rasio efisiensi kompor LPG ke kompor induksi sebesar 0,55.

⁷ Berdasarkan perhitungan penulis sendiri, dengan asumsi konsumsi LPG sebesar 11,4 kg per bulan per rumah tangga (Pranadji et al., 2010), dan dengan asumsi konsumsi energi ekuivalen tidak akan terpengaruh oleh peralihan ke kompor induksi.



Tabel 1. Biaya tambahan yang ditimbulkan peralihan ke kompor induksi listrik

| Biaya di muka untuk pembelian dan pemasangan kompor induksi | Biaya (Rp) |
|--|-------------------|
| Unit kompor induksi (2.000 W) | 2.000.000 |
| Peralatan memasak feromagnetik | 800.000 |
| Penambahan daya PLN ⁸ | 843.300 |
| Sertifikat kelayakan operasional (SLO) | 105.000 |
| Kabel watt tinggi | 1.100.000 |
| Total biaya di muka | 4.848.300 |

Sumber: Perhitungan penulis menggunakan data dari berbagai sumber

4.4 Promosi Memasak Menggunakan Listrik oleh Pemerintah Indonesia dan PLN

Reformasi subsidi LPG akan mempercepat peralihan ke penggunaan listrik untuk memasak. Pemerintah Indonesia juga sedang berencana mempromosikan peralihan ini secara aktif guna mengurangi belanja subsidi LPG, sesuai dengan yang dicanangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Pemerintah Indonesia, 2020). Oleh karenanya, PLN telah mengumumkan sebuah program untuk mendukung tujuan ini dalam bentuk potongan harga untuk penambahan daya listrik. PLN bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (yang merupakan BUMN) dan menawarkan pinjaman untuk membeli kompor induksi listrik, untuk mempromosikan penggunaan 1 juta kompor induksi listrik per tahun mulai tahun 2021 dan mencapai konversi sebesar 10 juta unit pada tahun 2030 (Andi & Perwitasari, 2020; Safitri & Setiawan, 2020). Namun, rencana tersebut akan memerlukan investasi masif untuk melakukan penambahan kapasitas listrik dan infrastruktur pendistribusian. Masih menjadi pertanyaan apakah PLN saat ini dapat menghadapi kenaikan permintaan dalam jumlah tersebut.

⁸ Ini merupakan biaya penambahan daya dari watt 1.300 VA ke 2.200 VA, meskipun biaya ini bisa saja lebih rendah karena PLN memiliki program untuk mendukung proses ini (lihat Bagian 4.4).



5.0 Studi Kasus Internasional

Meskipun sudah merencanakan reformasi subsidi LPG, Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan tindakan lebih lanjut untuk menerapkan rencana reformasi tersebut akibat krisis COVID-19. Namun negara lain telah menggunakan masa-masa krisis untuk menjalankan reformasi harga bahan bakar fosil serta melaksanakan upaya perlindungan sosial untuk memastikan kelompok miskin dapat tetap memenuhi kebutuhan energi mereka. Berikut ini adalah kompilasi studi kasus di India dan Meksiko yang memberikan pembelajaran berharga bagi Indonesia tentang manfaat reformasi harga bahan bakar fosil pada masa krisis, dan apa saja hambatan yang harus diatasi.

5.1 Studi Kasus India: Menaikkan pajak bahan bakar sebagai respons terhadap krisis COVID-19

5.1.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Anggaran Publik India

Perekonomian India mengalami kontraksi sebesar 23,9% dibanding tahun sebelumnya pada kuartal kedua tahun 2020 (PIB, 2020e). Penurunan ekonomi ini menguras pendapatan negara dari pajak, padahal di saat yang sama belanja program kesejahteraan untuk kelompok miskin dan pekerja migran justru meningkat (M. Sharma, 2020). Pada kuartal pertama tahun fiskal 2020/21, pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa adalah 41% lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (The Hindu, 2020). Selain itu, total penjualan bensin turun sebesar 60% pada bulan April 2020 dan 36% pada bulan Mei 2020 tahun ke tahun, sementara penjualan diesel jatuh sebesar 56% pada bulan April 2020 dan 29% pada bulan Mei 2020 dibandingkan dengan bulan-bulan yang sama pada tahun 2019 (Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020a).

Pada tahun fiskal 2018/19, cukai atas bensin dan solar berkontribusi hampir 11% kepada pendapatan pajak pemerintah pusat (Varadhan, 2020). Namun, realisasi pendapatan dari pajak tersebut lebih rendah dari ekspektasi pada musim semi 2020 akibat penurunan permintaan saat pembatasan kegiatan. Sementara itu resesi akibat COVID-19 diprediksi akan memotong pendapatan pemerintah sebesar 2%-3% dari PDB (Ayar, 2020).

5.1.2 Komposisi Harga Bahan Bakar India

Deregulasi harga bensin dan solar India pada tahun 2010 dan 2014 memungkinkan perusahaan pemasar minyak (*oil marketing companies/OMC*) untuk menyesuaikan harga berdasarkan harga minyak mentah internasional setiap dua minggu sekali (Surabhi, 2018). Sejak tahun 2017, OMC telah merevisi harga bahan bakar setiap hari untuk mencerminkan fluktuasi harga minyak mentah internasional dan angka konversi mata uang dalam harga ritel. Harga bensin dan solar terdiri dari empat komponen berikut (Manduva, 2018):

- Harga dasar: OMC mengenakan harga dasar kepada para penyalur berdasarkan harga minyak mentah global, nilai tukar, biaya pengangkutan/ kargo dan pemurnian, serta biaya lainnya.



- Pungutan cukai pusat: Pemerintah Pusat mengenakan tiga jenis bea cukai (dalam jumlah tetap per liter): Cukai Dasar, Cukai Tambahan Khusus, dan Cukai Tambahan .
- Komisi penyalur: OMC membayarkan komisi kepada penyalur pompa bensin.
- Pajak pertambahan nilai (PPN) pajak penjualan masing-masing negara bagian Pemerintah negara bagian mengenakan PPN atau pajak penjualan pada harga yang mencakup harga dasar, pajak cukai pusat, dan komisi penyalur.

5.1.3 Meningkatkan Pajak Bahan Bakar untuk Mengamankan Belanja Fiskal

Sebagai akibat runtuhnya harga minyak global akibat dimulainya perang harga antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dengan Rusia dan menurunnya permintaan akibat krisis COVID-19 global, harga bulanan rata-rata Indian Crude Basket, indikator harga impor minyak mentah India,⁹ jatuh dari US\$65,50 per barel pada bulan Januari 2020 menjadi US\$19,90 pada bulan April 2020 (Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020b). Alih-alih meneruskan penurunan harga tersebut kepada konsumen, Pemerintah Pusat India menaikkan pungutan cukai atas produk-produk bahan bakar sebanyak dua kali untuk memperoleh dana tambahan. Dana tersebut digunakan untuk menutup penurunan pendapatan dan memberikan dana bantuan sebesar INR1,7 triliun (US\$22,6 miliar) untuk paket pemulihan COVID-19 bagi kelompok miskin dan INR20 triliun bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Press Information Bureau [PIB], 2020c, 2020d). Pada bulan Maret, cukai tambahan khusus dinaikkan dari INR8 menjadi INR10 per liter untuk bensin dan dari INR2 menjadi INR4 per liter untuk solar (Central Board of Indirect Taxes and Customs [CBIC], 2020a). Pajak Jalan dan Infrastruktur (PJI), yang ditarik sebagai pungutan cukai tambahan, dinaikkan dari INR9 menjadi INR10 per liter untuk bensin dan solar (CBIC, 2020b). Pada awal bulan Mei, cukai tambahan khusus dinaikkan kembali sebesar INR3 per liter untuk bensin dan INR5 per liter untuk diesel (CBIC, 2020c), sementara PJI dinaikkan sebesar INR8 per liter untuk bensin dan solar (CBIC, 2020d). Perubahan-perubahan ini menaikkan pungutan cukai bensin sebesar INR13 (US\$0,18) menjadi INR32,98 (US\$0,45) per liter dan untuk solar sebesar INR16 (US\$0,22) menjadi INR31,83 (US\$0,43) per liter. Sejak bulan Maret 2020, 23 dari 28 negara bagian di India juga telah mengumumkan kenaikan PPN masing-masing (perhitungan penulis). Karena pemerintah pusat dan negara bagian dapat menerapkan kenaikan pajak ini masing-masing (tidak seperti pajak barang dan jasa di mana mereka harus mengambil keputusan bersama), cara ini kemudian menjadi cara cepat untuk mengumpulkan pendapatan dalam jumlah besar (Daniyal, 2020).

Menurut perhitungan IISD, peningkatan pungutan cukai ini telah menghasilkan pendapatan tambahan bagi Pemerintah Pusat sebesar sekitar INR1,4 triliun (US\$19,2 miliar) dalam 9 bulan sejak April hingga Desember 2020.

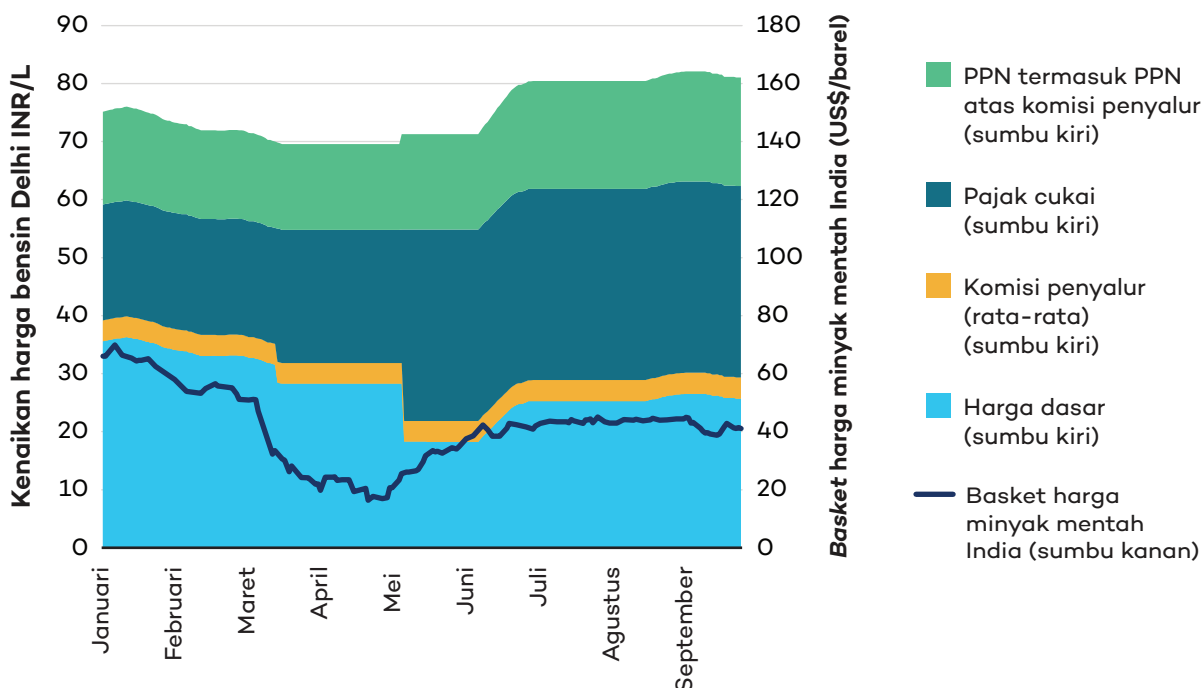
⁹ *Indian Crude Basket* mencerminkan basket turunan yang terdiri dari *sour grade* (rata-rata Oman & Dubai) dan *sweet grade* (Brent Dated) minyak mentah yang diproses di pengilangan India dalam rasio 75,50: 24,50 di sepanjang 2018/19.



5.1.4 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Harga Ritel

Ketika Pemerintah Pusat pertama kali menaikkan pajak cukai, Kementerian Keuangan India menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan menaikkan harga ritel bensin dan diesel (Magazine, 2020; Shine & Dhasmana, 2020). Karena OMC menyesuaikan kenaikan pajak berdasarkan harga minyak yang sedang rendah, tidak terjadi kenaikan berarti pada harga ritel antara bulan Maret hingga awal Juni. Meskipun hal ini pada awalnya menyebabkan margin OMC meningkat tajam (dari INR3 menjadi INR17-19 per liter yang dijual), karena kenaikan pajak lebih rendah dibandingkan penghematan mereka dari harga minyak yang lebih rendah, pemulihan harga minyak mentah (ke sekitar US\$40) pada akhir musim semi menjatuhkan margin OMC menjadi INR2 per liter dan memaksa mereka untuk mulai menaikkan harga ritel (Ananda & Shukla, 2020). Akibatnya, harga bensin dan solar naik di seluruh India (sebesar 13% dan 16% di Delhi, 11% dan 16% di Mumbai, dan 11% di Chennai) hingga akhir Juni (Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020c). Di sepanjang sisa tahun 2020, harga ritel bensin dan solar secara keseluruhan tetap stabil, seiring dengan kembali stabilnya harga minyak mentah. Perkembangan harga bensin dan solar selengkapnya dari bulan Januari hingga September 2020 ditampilkan pada Gambar 4 dan 5.

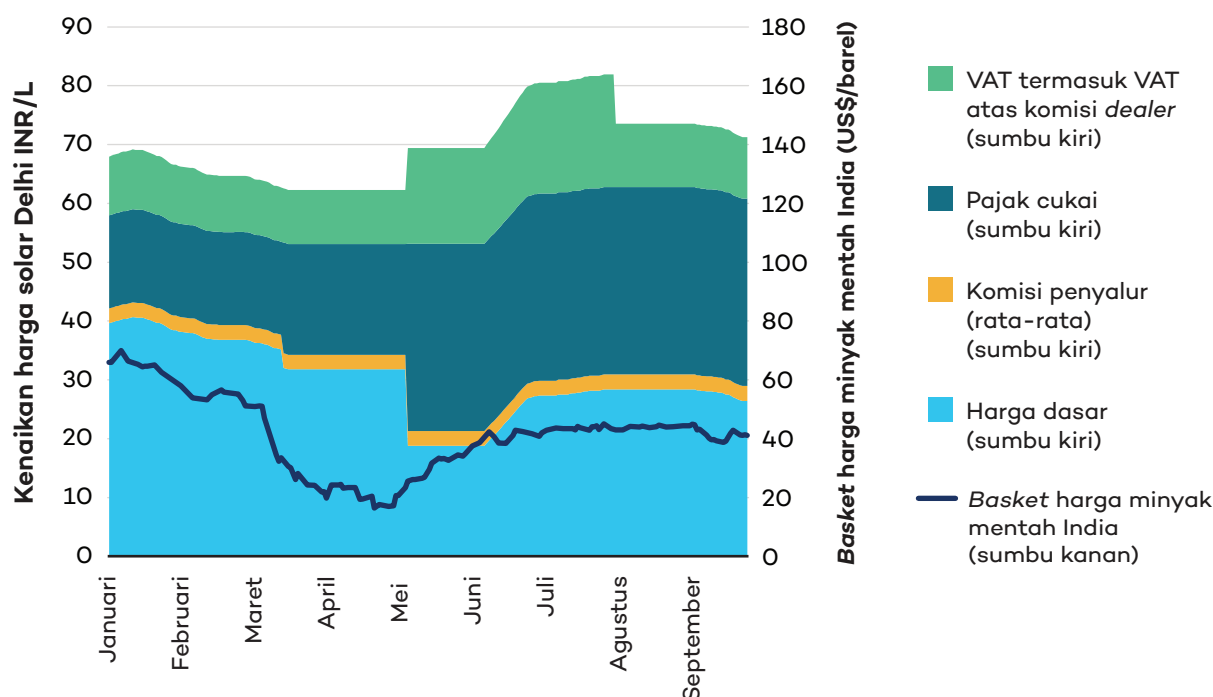
Gambar 4. Perubahan komponen harga bensin di Delhi antara bulan Januari hingga September 2020



Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan informasi yang diberikan oleh Petroleum Planning and Analysis Cell



Gambar 5. Perubahan komponen harga solar di Delhi antara bulan Januari hingga September 2020



Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan informasi yang diberikan oleh Petroleum Planning and Analysis Cell

5.1.5 Dampak Kenaikan Pajak Bahan Bakar pada Masyarakat

Karena mayoritas mobil pribadi di India dimiliki rumah-rumah tangga terkaya, masyarakat kaya jauh lebih terkena dampak langsung dengan kenaikan pungutan cukai dan PPN atas bahan bakar yang diterapkan oleh negara bagian (Bhattacharya, 2016). Namun, solar umumnya digunakan untuk transportasi komersial, khususnya truk, dan juga dalam jumlah kecil di sektor industri dan pertanian (U.S. Energy Information Administration, 2020). Kenaikan cukai ini telah meningkatkan inflasi menjadi lebih dari 6% pada bulan Juli dan Agustus 2020, yang berarti di atas target 4% (plus atau minus 2%) yang ditetapkan oleh Reserve Bank of India (Arun, 2020). Inflasi yang tinggi jauh lebih berdampak pada kelompok miskin yang menghabiskan proporsi pendapatan mereka lebih besar untuk kebutuhan dasar seperti makanan.

Namun, sebagian besar masyarakat tampak menerima kenaikan harga dan pajak dengan alasan untuk mengatasi krisis (Ayar, 2020). Penolakan yang lebih luas dari publik baru terjadi setelah OMC mulai menaikkan harga eceran bensin dan solar pada bulan Juni. Sejumlah protes dilaksanakan di seluruh India, termasuk protes skala nasional pada 29 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Congress Party, partai oposisi terbesar di India (The Times of India, 2020). Protes ini disusul dengan protes-protes lainnya - misalnya protes oleh asosiasi petani di negara bagian Punjab pada 22 Juli 2020 (ANI, 2020a), asosiasi nelayan di negara bagian Tamil Nadu



pada 25 Juli 2020 (ANI, 2020b), dan asosiasi pengemudi truk di negara bagian Madhya Pradesh dari 10 hingga 13 Agustus 2020 (Sachdev, 2020).

Pemerintah menanggapi aksi publik ini secara reaktif. Menteri perminyakan baru membuat pernyataan publik pada akhir Juni - yaitu ketika harga bahan bakar telah dinaikkan secara drastis - bahwa kenaikan harga tersebut tidak berdampak pada masyarakat kebanyakan karena rendahnya permintaan bahan bakar, dan menambahkan bahwa pemerintah harus bersiap menghadapi tantangan-tantangan masa depan (ET Bureau, 2020). Ia juga menambahkan bahwa pendapatan ekstra yang diperoleh dari kenaikan pajak bahan bakar telah membantu Pemerintah India mengumpulkan dana untuk berbagai program kesejahteraan - yang secara khusus dialokasikan untuk prioritas kesehatan dan lapangan kerja- sambil tetap menstabilkan anggaran publiknya (The New Indian Express, 2020).

Secara keseluruhan, dukungan kepada pemerintahan Modi tetap relatif stabil. Sebagai contoh, para pemilik kendaraan pribadi (kelompok yang sebenarnya berjumlah kecil namun memiliki suara kuat di media sosial dan arus utama) yang terkena dampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar umumnya merupakan pemilih tetap Partai Bharatiya Janata (BJP) (Daniyal, 2020). Sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada musim panas tahun 2020 menunjukkan bahwa 72% merasa puas dengan pemerintahan Modi, 74% merasa puas dengan cara penanganan krisis COVID-19, dan 79% menilai hasil kerja Modi "bagus" atau bahkan "luar biasa" (Kumar, 2020). Meskipun terjadi tanda-tanda meningkatnya oposisi, yang sebagian juga disebabkan isu tingginya harga bahan bakar, sejak musim semi 2021 posisi pemerintah masih tetap kuat.

5.1.6 Pembelajaran

Contoh kenaikan pajak bahan bakar transportasi dari India dapat memberikan pelajaran berikut bagi Indonesia:

1. **Memanfaatkan rendahnya harga minyak:** India menaikkan pungutan cukai atas bensin dan solar ketika harga minyak global sedang jatuh. Kebijakan ini membantu meredam dampak kenaikan harga bagi pelanggan, karena kenaikan pungutan ini disesuaikan dengan harga minyak yang rendah, dan harga ritel tetap cukup stabil selama beberapa waktu. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan cukai tidak akan menyebabkan kenaikan harga eceran bahan bakar, namun pemerintah melewatkan kesempatan untuk membangun strategi komunikasi mengenai alasan kenaikan pajak tersebut kepada masyarakat. Karenanya, ketidakpuasan publik menyeruak ketika harga ritel mulai naik pada bulan Juni.
2. **Pendapatan yang dihasilkan membantu melindungi kelompok miskin dan rentan:** Krisis COVID-19 memberi dampak besar terhadap perekonomian India, yang secara khusus berdampak sangat buruk pada kelompok miskin dan rentan. Di sisi lain, rumah tangga kaya yang akan dapat menikmati manfaat dari harga bahan bakar yang murah. Meningkatkan cukai bahan bakar dan menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk diinvestasikan pada program perlindungan kelompok miskin menciptakan hasil redistributif yang sangat signifikan.



- 3. Dukungan kuat terhadap pemerintah membantu pelaksanaan kenaikan pajak:** Terlepas dari kenaikan harga di sepanjang musim panas dan adanya gejala ketidakpuasan publik, penerimaan masyarakat terhadap kenaikan pajak tersebut serta dukungan kepada pemerintah relatif masih tinggi karena tingginya modal politik pemerintah yang berkuasa. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah, kerja sama dengan pihak oposisi dan pemangku kepentingan lainnya akan menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan reformasi tersebut.

5.2 Studi Kasus India: Skema perlindungan sosial baru untuk LPG sebagai respons terhadap krisis COVID-19

5.2.1 Dampak Krisis COVID-19 pada Masyarakat Miskin dan Rentan Lainnya di India

Pandemi COVID-19 berdampak negatif pada perekonomian dan anggaran publik India (Bagian 5.1), khususnya pada kelompok miskin dan rentan di India. Antara bulan Maret hingga awal April 2020, pengangguran meningkat tiga kali lipat, dari 8,7% menjadi 26% (Centre for Monitoring Indian Economy, 2020). Kelompok paling rentan terkena dampak adalah kelompok berpendapatan rendah dan informal seperti petani, pekerja domestik, pemilik usaha kecil, dan buruh upah harian yang tidak memiliki keamanan kerja. Selain itu, sekitar 100 juta pekerja migran di berbagai kota kehilangan pekerjaan dan harus kembali ke kampung halaman mereka di wilayah perdesaan sehingga mereka menyebabkan beban tambahan kepada perekonomian lokal (Sanghera, 2020; Singh, 2020). Menurut sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 47.000 rumah tangga berpendapatan rendah di 15 negara bagian India antara bulan April hingga Juni, lebih dari setengah pencari nafkah utama kehilangan pekerjaan mereka, dan pendapatan rumah tangga jatuh rata-rata hingga hanya 40% dibandingkan jumlah sebelum pembatasan kegiatan (Dalberg, 2020). Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dibarengi dengan perlindungan finansial yang terbatas bagi kelompok berpendapatan rendah dan yang terpinggirkan secara sosial juga semakin memperparah kondisi ini (Ahmed et al., 2020; Carswell et al., 2015). Pandemi ini dapat mengurangi pencapaian India dalam upaya mengentaskan kemiskinan (Bank Dunia, 2020).

5.2.2 Program-program Perlindungan Sosial India untuk Menggunakan LPG

India menjalankan berbagai program perlindungan sosial yang dilaksanakan di berbagai tingkatan. Subsidi untuk penggunaan LPG domestik didistribusikan melalui dua skema. Skema pertama disebut sebagai Bantuan Langsung Tunai (*Direct Benefit Transfer for LPG [DBT-L]*), yaitu sebuah subsidi konsumsi yang diluncurkan pada tahun 2014. Berdasarkan skema ini, para penerima manfaat - yaitu rumah tangga perdesaan di bawah garis kemiskinan - membeli LPG pada harga pasar penuh dan menerima manfaat yang ditransfer langsung ke rekening bank mereka. Penerima manfaat diizinkan membeli sebelas LPG tabung 14,2 kg per tahun dengan harga subsidi, ditambah satu tabung gratis (Kementerian Perminyakan dan Gas Alam [MoPNG], 2020a). Skema kedua adalah Pradhan Mantri Ujjwala Yojana



(PMUY), yaitu subsidi yang diluncurkan pada tahun 2016 dan bertujuan memberikan 50 juta koneksi LPG secara gratis¹⁰ selama tiga tahun kepada para perempuan di bawah garis kemiskinan, atau para perempuan dari komunitas tertinggal yang ditentukan melalui Sensus Sosial Ekonomi dan Kasta India 2011 (MoPNG, 2016). Sejak September 2019, lebih dari 80 juta koneksi LPG telah dibuat, dengan nilai subsidi yang berbeda-beda bergantung pada harga di masing-masing negara bagian (MoPNG, 2020b). Pada bulan Februari 2021, pemerintah mengumumkan target baru untuk menambah 10 juta koneksi LPG baru berdasarkan skema ini (PIB, 2021).

Pemerintah India telah bekerja keras meningkatkan penargetan subsidi koneksi maupun konsumsi LPG melalui berbagai cara, seperti penargetan volumetrik, penargetan pendapatan, dan skema memilih keluar secara sukarela (Sharma et al., 2019). Pendekatan-pendekatan ini telah meningkatkan penargetan subsidi LPG kepada rumah tangga miskin, namun masih banyak lagi yang harus dilakukan. Sebuah studi di negara bagian Jharkhand menemukan bahwa lebih dari setengah subsidi LPG justru menguntungkan rumah tangga terkaya dari kelompok berpendapatan 40% teratas (Sharma et al., 2021).

5.2.3 Upaya Perlindungan Sosial LPG Baru sebagai Respons terhadap COVID-19

Untuk menanggulangi krisis COVID-19, Pemerintah India memanfaatkan sistem distribusi publik dan platform DBT untuk menjalankan berbagai upaya perlindungan sosial baru di bawah berbagai program yang telah ada sebelum pandemi. Paket yang diumumkan pada akhir Maret 2020 ini bernilai total INR1,7 triliun (US\$22,94 miliar), dan mencakup pemberian tabung LPG gratis dan juga berbagai kebijakan lainnya (seperti distribusi bahan pangan kepada kelompok miskin, bantuan tunai kepada petani, peningkatan upah untuk skema kerja publik perdesaan nasional, bantuan tunai kepada rumah tangga yang sasaran inklusi finansial, dan bantuan tunai kepada para janda dan penyandang disabilitas) (PIB, 2020d).

Antara bulan April hingga Juni 2020, 83 penerima manfaat PMUY diberikan hak atas tiga tabung LPG isi ulang gratis yang diantar langsung ke rumah mereka (PIB, 2020a). Para penerima manfaat ini menerima pembayaran tunai di awal yang setara dengan harga eceran satu LPG tabung isi ulang ke rekening bank mereka, dan dua transfer berikutnya menyusul jika transfer tunai awal tersebut telah digunakan untuk membeli LPG tabung (Abdi, 2020). Program ini diperpanjang hingga September untuk sebagian penerima manfaat yang tidak dapat membelanjakan bantuan tunai awal tersebut pada bulan Juni, lalu diperpanjang kembali hingga bulan Maret 2021 (Johari, 2021; PIB, 2020b). Secara keseluruhan sebanyak 141,4 juta LPG tabung gratis telah didistribusikan, dan sekitar INR109,9 miliar¹¹ (US\$1,48 miliar) telah ditransfer ke 75 juta penerima manfaat PMUY antara bulan April hingga November 2020 (PIB, 2020f).

¹⁰ Satu koneksi berbiaya INR1,600 (US\$22,72) (Comptroller and Auditor General of India, 2019).

¹¹ Menurut pemerintah, sebanyak INR97,09 miliar (US\$1,31 miliar) telah ditransfer antara bulan April hingga Juni. Dari bulan Juli hingga September, harga rata-rata LPG tabung (INR594) naik berlipat ganda antara 141,3 juta (total jumlah tabung yang diluncurkan ke pasar) dan 119,7 juta (jumlah tabung yang diluncurkan antara bulan April dan Juni 2020). Angka ini (INR12,83 miliar) kemudian ditambahkan ke INR97,09 miliar untuk memperkirakan belanja total pemerintah untuk kebijakan ini.

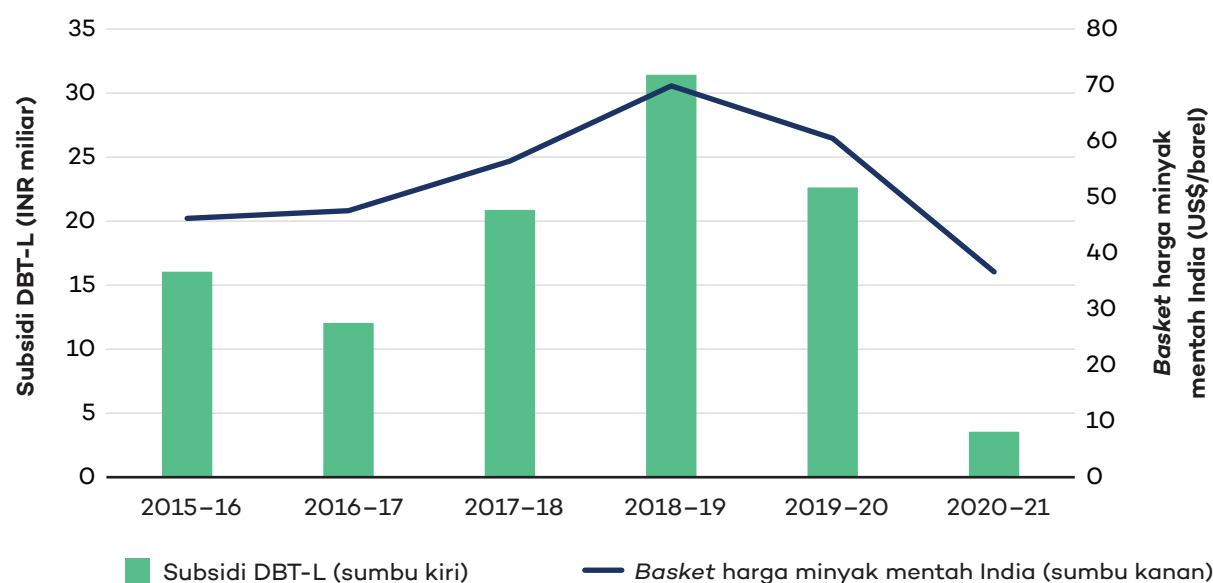


Program LPG gratis ini telah membantu kelompok penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan energi mereka pada masa krisis (Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020a). Namun, hanya sekitar 60% dari jumlah tabung gratis yang ditargetkan yang berhasil didistribusikan pada periode hingga November 2020, yang menunjukkan adanya kemungkinan overestimasi konsumsi LPG di kalangan penerima manfaat dan cakupan dari kebijakan PMUY yang kemungkinan masih kurang akurat. Sebuah survei menunjukkan bahwa 36% penerima manfaat menggunakan pembayaran bantuan di awal tersebut untuk tujuan lain, 40% tidak memiliki tabung kosong di rumah untuk diisi ulang, dan sisanya menghadapi kendala teknis terkait perbankan dan Aadhar, yaitu basis data identifikasi India yang seragam namun belum lengkap (Choudhary, 2020). Isu-isu teknis ini berdampak pada 3,1 juta hingga 7,6 juta penerima manfaat yang berhak, yang hingga bulan Agustus belum menerima pembayaran bantuan awal mereka (N. Sharma, 2020).

5.2.4 Pembiayaan Upaya Perlindungan Sosial Baru

Penurunan harga pasar LPG tabung 14,2kg akibat turunnya harga minyak internasional telah menghilangkan kesenjangan antara harga subsidi dengan harga pasar, dan secara efektif menghapuskan subsidi pada bulan Mei 2020 (IANS, 2020). Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, belanja untuk LPG bersubsidi jauh lebih rendah pada tahun fiskal 2020/21 (Gambar 6). Hal ini memberikan penghematan fiskal kepada pemerintah yang dapat digunakan untuk berbagai kebijakan kesejahteraan lainnya, termasuk penyediaan LPG gratis. Harga LPG telah memulih sejak bulan Desember 2020, namun pemerintah masih belum memberlakukan kembali subsidi LPG, sehingga LPG tabung masih belum terjangkau bagi rumah-rumah tangga miskin yang belum menerima isi ulang gratis (Johari, 2021).

Gambar 6. Belanja India untuk DBT-L dan evolusi harga minyak mentah di India
Basket antara tahun 2015 dan 2021



Sumber: Petroleum Planning and Analysis Cell, 2020b, 2021.



5.2.5 Pembelajaran

Contoh dari India dalam memberikan LPG gratis kepada kelompok miskin selama krisis COVID-19 dapat memberikan pembelajaran berikut bagi Indonesia:

- 1. Dukungan khusus bagi kelompok rentan pada masa-masa krisis:** India menggunakan bantuan tunai untuk mensubsidi konsumsi LPG, namun harga minyak yang rendah memungkinkan Pemerintah India untuk menghapuskan subsidi-subsidi ini tanpa menaikkan harga. Lebih lanjut, kelompok-kelompok rentan secara khusus menerima dukungan tambahan dalam bentuk pemberian gratis hingga tiga LPG tabung bagi perempuan miskin antara bulan April hingga September 2020, selain paket COVID-19 umum yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, pemerintah masih belum mengumumkan rencana yang jelas untuk memberlakukan kembali subsidi LPG untuk membuat harga LPG tabung lebih terjangkau setelah tenggat waktu isi ulang LPG gratis terlampaui pada bulan Maret 2021.
- 2. Mengembangkan skema yang telah ada:** Para penerima manfaat bantuan isi ulang gratis adalah penerima manfaat yang sama yang memperoleh skema perlindungan sosial yang sudah ada yang bertujuan mendistribusikan koneksi LPG baru. Oleh karenanya, basis data ini adalah basis data yang kuat, dan upaya-upaya ini dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
- 3. Pemantauan dan perencanaan yang lebih seksama atas upaya-upaya tersebut akan meningkatkan efisiensi:** Secara keseluruhan, hanya sekitar 140 juta isi ulang gratis LPG tabung yang diberikan melalui kebijakan ini - atau lebih rendah 100 juta dibandingkan yang sebenarnya dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah melakukan overestimasi kebutuhan aktual para penerima manfaat, sehingga sebagian besar penerima manfaat tampak tidak menggunakan ketiga LPG tabung gratis pada waktu yang diberikan. Selain itu, LPG tabung gratis ini juga hanya terdistribusi ke 75 juta penerima manfaat PMYU, yang berarti sekitar 8 juta perempuan terlewatkan sepenuhnya dari upaya perlindungan sosial ini. Sementara sebagian memilih menggunakan pembayaran pertama untuk hal lain atau tidak cukup banyak menggunakan LPG hingga dapat merasakan manfaat isi ulang gratis, sebagian lainnya tidak pernah menerima pembayaran di awal yang sebenarnya dapat digunakan untuk isi ulang akibat sejumlah alasan teknis.

5.3 Studi Kasus Meksiko: Memperluas program perlindungan sosial yang ada sebagai respons terhadap krisis ekonomi global 2008/09

5.3.1 Dampak Krisis Ekonomi Global 2008/09 pada Perekonomian Meksiko

Resesi besar yang terjadi pada akhir tahun 2000an menyebabkan perekonomian Meksiko mengalami kontraksi sebesar lebih dari 5% pada tahun 2009 (Sistema de Información



Energética, n.d.). Krisis keuangan ini menyebabkan penurunan tajam pada pendapatan sektor publik, depresiasi mata uang sebesar 25%, dan penurunan investasi asing sebesar 42,5% pada tahun 2009 (Villarreal, 2010). Krisis keuangan ini juga berdampak besar bagi pasar tenaga kerja Meksiko, yang mengalami angka pengangguran tertinggi dalam satu dekade hingga mencapai 7,6% di perkotaan dan 3,7% di komunitas kecil. Antara tahun 2006 hingga 2010, populasi miskin total Meksiko¹² meningkat dari 42,87% menjadi 51,08% (Conselo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social [CONEVAL], 2016). Saat itu, LPG, bensin, dan solar masih disubsidi. Tidak lama kemudian reformasi dimulai, dan kenaikan harga pertama dilaksanakan pada tahun 2010 (Sanchez et al., 2018). Sementara harga LPG - yang ditetapkan secara *ad hoc* di bawah harga pasar internasional - dan harga bensin dan solar nasional - yang mengikuti formula pemulusan harga/*price-smoothing*- diliberalisasi secara penuh pada tahun 2017, harga listrik juga disubsidi bagi sebagian besar kategori rumah tangga dan konsumen pertanian. Meskipun sejumlah upaya reformasi telah dilakukan, 99% pengguna rumah tangga masih menikmati tarif listrik bersubsidi pada tahun 2016.

5.3.2 Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal (*Oportunidades*) sebagai Perlindungan Sosial

Meksiko telah menjalankan program bantuan tunai (*Oportunidades*) untuk melindungi kelompok rentan yang berjalan dari tahun 1997 hingga 2019;¹³ yang mencakup wilayah perkotaan pada tahun 2002 (Dávila Lárraga, 2016). Pendaftaran *Oportunidades* pada awalnya hanya diperuntukkan bagi rumah tangga di komunitas yang terpilih berdasarkan mekanisme penargetan geografis, yang mempertimbangkan tingkat literasi, pendidikan, akses kepada layanan kesehatan, akses kepada listrik, akses air pipa, tingkat kepadatan, adanya lantai semen di rumah, dan pendapatan rumah tangga (Sanchez et al., 2020). Berbagai manfaat tersebut didistribusikan ke berbagai fasilitas masyarakat seperti sekolah dan rumah sakit.

5.3.3 Memperluas Program Bantuan Tunai Pemerintah Federal dengan Komponen Energi untuk Melindungi Kelompok Miskin dari Harga Minyak yang Tinggi

Pada tahun 2007, *Oportunidades* diperluas dengan memasukkan komponen untuk membantu meringankan biaya energi rumah tangga (*Oportunidades Energéticas*) dengan nilai MXN50 (US\$4,57) per bulan, yang dinaikkan menjadi MXN55 (US\$4,91) pada tahun 2008 dan menjadi MXN60 (USD4,74) pada tahun 2010 (Laan et al., 2012; Ordóñez-Barba & Silva Hernández, 2019). Belanja untuk komponen energi ini mencapai sekitar 9,5% belanja total pada tahun 2008 dan 7% pada tahun 2010, untuk total tahunan antara US\$200 juta dan 300

¹² Kemiskinan mencakup kemiskinan pangan dan kemiskinan pendapatan. Sebuah metode perhitungan baru (untuk menghitung yang disebut kemiskinan ekstrem dan kemiskinan moderat) diperkenalkan pada tahun 2006, dan kedua metode tersebut digunakan hingga tahun 2016. Data untuk metode baru ini hanya tersedia sejak tahun 2008 dan setelahnya. Karenanya metode lama (kemiskinan pangan dan pendapatan) digunakan untuk tahun sebelum 2008. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Medicion-por-ingresos-1990-2012.aspx>

¹³ Program perlindungan sosial bantuan tunai bersyarat ini kemudian digantikan dengan Benito Juárez Scholarship Coordination pada tahun 2019. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat <https://www.jornada.com.mx/2019/01/30/sociedad/032n1soc>:



juta dari tahun 2007 hingga 2009 (Sanchez et al., 2020; SEGOB, 2008, 2010a). *Oportunidades Energéticas* dilaksanakan sebagai tambahan atas subsidi bahan bakar fosil yang ada saat ini (bensin, solar, dan LPG) sebagai akibat tingginya harga minyak. Namun belanja untuk subsidi umum seperti itu jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, US\$25 miliar dibayarkan untuk subsidi bahan bakar pada tahun 2008. (Global Subsidies Initiative, 2008; Kitson et al., 2016; SEGOB, 2010b). Program ini juga bertujuan untuk mempromosikan akses kepada energi modern dan mengurangi penggunaan bahan bakar berpolusi (Sanchez et al., 2020). Namun, program ini hanya mengompensasi para penerima manfaat atas kenaikan harga terakhir (LPG dan listrik), dan jumlah total yang ditransfer kepada penerima manfaat berdasarkan skema ini berjumlah hingga 21%-25% belanja energi rumah tangga. Karena manfaatnya berupa bantuan tunai, rumah tangga dapat membelanjakannya untuk tujuan apa pun dan tidak harus untuk kebutuhan energi. Meskipun setiap rumah tangga yang terdaftar di *Oportunidades* secara teori diizinkan mendaftarkan diri pada *Oportunidades Energéticas*, persyaratan untuk menyerahkan tagihan listrik membuat 10% dari mereka tidak dapat menerima transfer tunai tambahan (Sanchez et al., 2020).

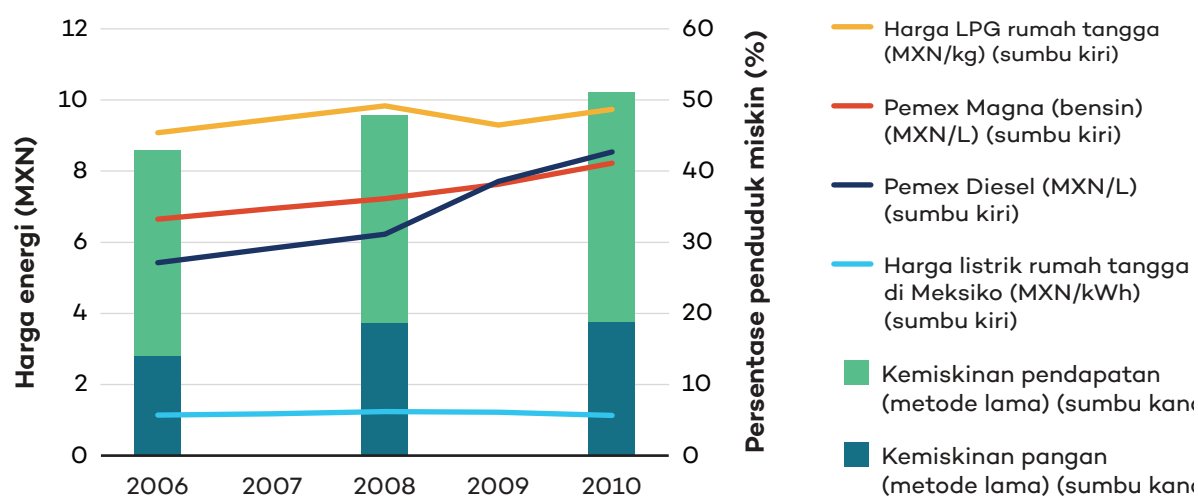
5.3.4 Dampak Komponen Energi

Meskipun memiliki sejumlah kekurangan, evaluasi dampak *ex-ante* eksternal yang dilakukan terhadap *Oportunidades Energéticas* oleh Kementerian Pembangunan Sosial menemukan bahwa mekanisme penargetan yang tepat bagi program ini berhasil mengurangi sifat regresif subsidi (Sanchez et al., 2020). Bahkan, sekitar 85% subsidi yang disalurkan kepada masyarakat berhasil mencapai 40% rumah tangga termiskin pada tahun pertama sejak dimulainya program tersebut, dan hampir 75% mencapai 30% kelompok termiskin (Komives et al., 2009). Lebih lanjut, bantuan tunai tersebut telah berdampak signifikan pada akumulasi aset rumah tangga, dan mendorong kenaikan adopsi peralatan listrik (Gertler et al., 2013).

Namun, antara tahun 2006 dan 2010, angka kemiskinan meningkat dari 43% menjadi 51% antara lain akibat kenaikan harga bahan bakar transportasi, LPG, dan listrik (Gambar 9). Namun, dampak krisis ini akan jauh lebih parah jika tidak ada program pemerintah yang mendukung perlindungan sosial. Karenanya, CONEVAL menemukan bahwa tanpa *Oportunidades*, akan terjadi tambahan hampir dua juta orang yang menderita akibat kemiskinan pangan pada tahun 2008 (CONEVAL, 2009).



Gambar 7. Perubahan angka kemiskinan dan harga energi antara tahun 2006 dan 2010



Sumber: Berdasarkan data dari CONEVAL, 2016; Secretaria de Energía, 2017; Sistema de Información Energética, 2010a, 2010b.

5.3.5 Pembelajaran

Contoh dari Meksiko dengan memasukkan komponen energi ke dalam bantuan tunai bersyarat selama periode Resesi Besar dapat memberikan pembelajaran berikut bagi Indonesia:

1. **Bantuan tunai energi tertarget berdampak positif pada kondisi sosial-ekonomi:** Pemerintah Meksiko memasukkan komponen energi sebagai bagian dari program bantuan tunainya kepada orang miskin untuk merespons kenaikan harga energi pada akhir tahun 2000an. Dalam hal perlindungan sosial, komponen energi dianggap efisien, karena sebagian besar dana sebenarnya tersalur ke segmen masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perlindungan sosial dan dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki akses kepada listrik. Sifat jaring pengaman energi yang sangat progresif ini membantu meredam peningkatan kemiskinan selama krisis ekonomi tahun 2008/09.
2. **Efisiensi biaya dari upaya ini memang terbatas, mengingat bantuan tunai energi tertarget dilaksanakan untuk melengkapi subsidi energi umum:** Pelaksanaan bantuan tunai energi berjalan seiring dengan subsidi bahan bakar secara umum (bensin, solar, LPG) dan listrik. Karenanya, kebijakan ini tidak menciptakan penghematan anggaran yang dapat dialokasikan untuk tujuan lain yang lebih produktif.
3. **Bantuan tunai energi dapat digunakan untuk belanja non-energi:** Bantuan tunai energi didistribusikan sebagai bagian dari transfer yang lebih besar kepada para penerima manfaat tanpa kewajiban membelanjakannya untuk kebutuhan energi. Hal ini menimbulkan risiko tidak digunakannya uang bantuan tersebut untuk belanja energi, dan karenanya akan mengganggu pencapaian sasaran pemerintah yang penting seperti meningkatkan akses energi. Pemerintah juga dapat melakukan studi awal



untuk mengidentifikasi kebutuhan aktual masyarakat agar subsidi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan secara efektif. Hal ini akan menciptakan subsidi yang jauh lebih efisien.



6.0 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia mengadopsi program konversi transformatif untuk mengurangi belanja publik untuk minyak tanah dan mengurangi polusi udara pada tahun 2007 dengan mendorong peralihan ke LPG. Hal ini membuat LPG menjadi bahan bakar memasak paling dominan di Indonesia saat ini. Namun, kebijakan ini juga meningkatkan biaya bagi Pemerintah Indonesia, karena LPG bersubsidi menjadi sangat mudah diakses oleh semua orang. Upaya ini menjadi beban keuangan yang besar yang juga sangat regresif, karena sebagian besar belanja justru tersalur ke kelompok kaya yang memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi dan secara umum mudah mengakses LPG.

Setelah melakukan berbagai upaya yang kurang berhasil untuk mengurangi belanja subsidi LPG, Pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan untuk menerapkan sistem subsidi LPG tertarget. Sistem tertarget tidak hanya akan mengurangi belanja publik untuk subsidi dan impor LPG secara signifikan, namun juga membuat distribusi ini lebih adil, karena subsidi hanya akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

TNP2K telah merancang sebuah rencana untuk membatasi penerima manfaat subsidi LPG di masa depan berdasarkan data dari basis data subsidi listrik. Selain itu, TNP2K juga telah menguji teknologi biometrik untuk melaksanakan beberapa proyek uji cobayang aman dan lancar. Namun, pendekatan baru yang awalnya dijadwalkan untuk diluncurkan pada tahun 2020 ini tertunda akibat krisis COVID-19.

Namun demikian, beberapa contoh dari sejumlah negara berkembang telah menunjukkan bahwa krisis justru dapat memberikan peluang untuk melakukan reformasi harga bahan bakar fosil dan juga memperkuat sistem kesejahteraan negara yang bersangkutan. Berdasarkan pembelajaran dari studi-studi kasus tersebut, terdapat beberapa rekomendasi bagi Indonesia terkait reformasi subsidi LPG yang dilaksanakannya.

SARAN:

- 1. Indonesia dapat menghentikan subsidi LPG dari yang sebelumnya dinikmati kelompok kaya, lalu menggunakan dana yang dihemat untuk membantu kelompok yang paling rentan akan dampak krisis:** Kelompok miskin di masyarakat lebih rentan terhadap guncangan ekonomi karena mereka berisiko lebih besar kehilangan pekerjaan dan memiliki tabungan yang lebih terbatas untuk menjaga standar hidup mereka. Dukungan khusus dari pemerintah terbukti sangat penting untuk melindungi kelompok tersebut. Memperkuat sistem kesejahteraan sosial - yang antara lain diperoleh dari penghematan dana dari subsidi yang tidak efisien atau pun pengenaan pajak atas bahan bakar fosil, seperti yang dicontohkan India - adalah salah satu cara untuk melindungi kelompok rentan ketika dana publik terbatas. Di saat yang sama, peningkatan emisi GRK akibat perubahan ke tenaga listrik relatif kecil.
- 2. Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan proses pengumpulan data yang kuat:** Penyaluran bantuan pemerintah secara tertarget membawa risiko, yaitu adanya sebagian penerima manfaat yang berhak yang akan terlewat jika proses pengumpulan data yang dilakukan tidak sempurna. Hal ini harus dihindari dengan cara apa pun agar Pemerintah Indonesia dapat memulai



penyaluran bantuan tertarget secara lebih umum (misalnya dengan menggunakan data subsidi listrik) dan menyesuaikan daftar penerima manfaat tertarget dari waktu ke waktu seiring dengan semakin baiknya sistem pengumpulan data. Pemerintah dapat melakukan survei, sensus publik, atau analisis atas dampak pada daya beli atau inflasi untuk menentukan upaya terbaik yang perlu dilakukan untuk memahami apakah reformasi yang dilakukan juga akan berdampak pada kelompok lain di desil pendapatan menengah. Setiap hambatan yang menghalangi penerima manfaat yang berhak dalam mengakses subsidi harus diatasi, dan akses bagi para penerima manfaat tersebut harus disediakan dengan cara semudah mungkin. Selain itu, pemerintah juga perlu memahami kebutuhan aktual masyarakat (misalnya, dengan tidak mendistribusikan LPG lebih banyak dari yang dibutuhkan seperti yang terjadi di India) dan manfaat alternatif lain yang dapat mereka tawarkan selain LPG, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak (misalnya akses kepada layanan kesehatan publik, transportasi umum, pendidikan, dan sebagainya).

- 3. Indonesia harus memadukan reformasi subsidi LPG dengan rencana dukungan publik yang kuat:** Rencana ini harus mencakup pelibatan kelompok politik dan kelompok berpengaruh lainnya untuk memperoleh komitmen politik yang lebih luas, mengkomunikasikan sasaran dan manfaat reformasi subsidi LPG serta upaya-upaya kompensasi secara proaktif, serta dengan pengaturan waktu yang sedini mungkin. Elemen-elemen ini akan menjadi faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendekatan seperti ini dapat membatasi protes publik terhadap kenaikan harga (seperti yang terjadi di India terkait pajak bahan bakar), membantu masyarakat mempersiapkan diri (misalnya dengan mendaftar ke mekanisme kompensasi yang relevan), dan menunjukkan bahwa pemerintah bersikap transparan dan terbuka dalam bertindak. Perancangan rencana semacam ini tentunya bukan tugas mudah dan memerlukan dialog intensif dengan para pemangku kepentingan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan modal politik yang tinggi serta pengalaman positif reformasi subsidi bahan bakar di masa lalu untuk mendukung reformasi subsidi LPG saat ini.
- 4. Indonesia dapat memanfaatkan momentum rendahnya harga minyak:** Krisis COVID-19 pada awalnya menyebabkan jatuhnya harga minyak internasional, dan pembatasan kegiatan yang berkepanjangan di banyak negara membuat harga tetap rendah. Penurunan harga minyak ini seharusnya akan melunakkan hambatan politik terhadap reformasi subsidi. Momentum ini memberikan penyangga untuk menghadapi potensi guncangan akibat kenaikan harga - serupa dengan pengalaman Indonesia dalam menjalankan reformasi subsidi bensin dan solar pada tahun 2014/15. Hal ini membuat penolakan terhadap reformasi dapat dibatasi dan penerimaan publik dapat ditingkatkan. Reformasi masih relevan ketika harga telah kembali pulih di masa depan. Namun, rencana reformasi dan kompensasi yang matang menjadi sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari guncangan harga (Beaton et al., 2013).



Referensi

- Abdi, B. (2020, April 9). *Ujjwala beneficiaries entitled to 3 free LPG cylinders under PM Garib Kalyan Yojana, can avail free cylinders up to March 2021*. [ETEnergyworld.com](https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/ujjwala-beneficiaries-entitled-to-3-free-lpg-cylinders-under-pm-garib-kalyan-yojana-can-avail-free-cylinders-up-to-march-2021/74929070). <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/ujjwala-beneficiaries-entitled-to-3-free-lpg-cylinders-under-pm-garib-kalyan-yojana-can-avail-free-cylinders-up-to-march-2021/74929070>
- Ahmed, F., Ahmed, N., Pissarides, C., & Stiglitz, J. (2020). Why inequality could spread COVID-19. *The Lancet Public Health*, 5(5), e240. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30085-2](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30085-2)
- Ananda, J., & Shukla, A. (2020, June 18). *Fuel tax hikes feed Centre's kitty, extra revenue likely over Rs 15,950 crore so far*. New Indian Express. <https://www.newindianexpress.com/business/2020/jun/18/fuel-tax-hikes-feed-centres-kitty-extra-revenue-likely-over-rs-15950-crore-so-far-2158065.html>
- Andi, S & Perwitasari, A. S. (2020, November 12). *PLN to collaborate with BTN to promote induction stoves*. Kontan. <https://industri.kontan.co.id/news/pln-gandeng-btn-untuk-dorong-pengembang-manfaatkan-kompur-induksi>
- ANI. (2020a, July 22). *Farmers protest against govt ordinances, fuel price hike*. [ETEnergyworld.com](https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/farmers-protest-against-govt-ordinances-fuel-price-hike/77098688). <https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/oil-and-gas/farmers-protest-against-govt-ordinances-fuel-price-hike/77098688>
- ANI. (2020b, July 25). *Fishermen's body protests against rising fuel prices*. [BW Businessworld](http://businessworld.in/article/Fishermen-s-body-protests-against-rising-fuel-prices-/25-07-2020-301264). <http://businessworld.in/article/Fishermen-s-body-protests-against-rising-fuel-prices-/25-07-2020-301264>
- Arun, M. (2020, July 11). *Fuel prices: The burning issue*. India Today. <https://www.indiatoday.in/magazine/up-front/story/20200720-fuel-prices-the-burning-issue-1699252-2020-07-11>
- Audit Board of the Republic of Indonesia. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Tahun 2019 (Audited)* [in Bahasa]. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2019/lkpp_2019_1594712816.pdf
- Ayar, S. S. A. (2020, July 5). *Higher fuel taxes, fewer subsidies are good policy*. Times of India Blog. <https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/Swaminomics/higher-fuel-taxes-fewer-subsidies-are-good-policy/>
- Beaton, C., Gerasimchuk, I., Laan, T., Lang, K., Vis-Dunbar, D., & Wooders, P. (2013). *A guidebook to fossil-fuel subsidy reform for policy-makers in Southeast Asia*. Global Subsidies Initiative of the International Institute for Sustainable Development. https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_guidebook.pdf
- Beaton, C., & Lontoh, L. (2010, October 22). *Lessons learned from Indonesia's attempts to reform fossil-fuel subsidies*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/lessons-learned-indonesias-attempts-reform-fossil-fuel-subsidies>



- Bhattacharya, P. (2016, December 12). *One in three households in India owns a two-wheeler*. <http://www.ice360.in/events/one-in-three-households-in-india-owns-a-two-wheeler>
- Budya, H., & Yasir Arofat, M. (2011). Providing cleaner energy access in Indonesia through the megaproject of kerosene conversion to LPG. *Energy Policy*, 39(12), 7575–7586. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.02.061>
- Carswell, G., de Neve, G., & Yuvaraj, S. (2015). Fifty days of lockdown in India: A view from two villages in Tamil Nadu. *Economic and Political Weekly*, 7–8.
- Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). (2020a). *Notification No. 3/2020-Central Excise*. <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/excise/cx-act/notifications/notfns-2020/cx-tarr2020/ce03-2020.pdf>
- Central Board of Indirect Taxes and Customs. (2020b). *Notification No. 4/2020-Central Excise*. <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/excise/cx-act/notifications/notfns-2020/cx-tarr2020/ce04-2020.pdf>
- Central Board of Indirect Taxes and Customs. (2020c). *Notification No. 5/2020-Central Excise*. <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/excise/cx-act/notifications/notfns-2020/cx-tarr2020/ce05-2020.pdf>
- Central Board of Indirect Taxes and Customs. (2020d). *Notification No. 6/2020-Central Excise*. <https://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/excise/cx-act/notifications/notfns-2020/cx-tarr2020/ce06-2020.pdf>
- Central Bureau of Statistics. (2020, July 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen* [in Bahasa]. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- Centre for Monitoring Indian Economy. (2020, October 1). *Unemployment rate in India*. <https://unemploymentinindia.cmie.com/>
- Choudhary, S. (2020, October 14). *Ujjwala beneficiaries used only 60% free cooking gas refills in 6 months*. *Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/ujjwala-beneficiaries-used-only-60-free-cooking-gas-refills-in-6-months/articleshow/78648823.cms>
- Citra, L. (2020, January 16). *10 juta Rumah Keluarga Mampu Ikut Nikmati Subsidi Gas Elpiji* [in Bahasa]. [kbr.id. https://kbr.id/nasional/01-2020/10-juta-rumah-keluarga-mampu-ikut-nikmati-subsidi-gas-elpiji/102000.html](https://kbr.id/nasional/01-2020/10-juta-rumah-keluarga-mampu-ikut-nikmati-subsidi-gas-elpiji/102000.html)
- Climate Analytics & Climate Action Tracker. (2020). *Climate Action Tracker: Indonesia*. Climate Analytics. <https://climateactiontracker.org/countries/indonesia/>
- Comptroller and Auditor General of India (CAG). (2019). *Performance audit of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, Ministry of Petroleum and Natural Gas* (Report No.14 of 2019). Comptroller and Auditor General of India. https://cag.gov.in/cag_old/content/report-no14-2019-performance-audit-pradhan-mantri-ujjwala-yojana-ministry-petroleum-and



- CONEVAL. (2009). *Evolución de la pobreza en México* [in Spanish]. <http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/219264/558315/file/Evoluci%C3%B3n%20de%20la%20pobreza%2030%20JUL%2009%20CONEVAL.pdf>
- CONEVAL. (2016). *Evolución de las dimensiones de pobreza* [in Spanish]. <https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Evolucion-de-las-dimensiones-de-pobreza.aspx>
- Dalberg. (2020). *Efficacy of government entitlements for low-income families during Covid-19: Findings from a study of 47,000 low-income households across India conducted between April 5, 2020 and June 3, 2020*. Dalberg.
- Daniyal, S. (2020, July 5). *Scroll explainer: Why petrol and diesel prices in India keep on rising (and rising, and rising)*. Scroll.In. <https://scroll.in/article/966345/scroll-explainer-why-petrol-and-diesel-prices-in-india-keep-on-rising-and-rising-and-rising>
- Dávila Lárraga, L. G. (2016). *How does Prospera work? Best practices in the implementation of conditional cash transfer programs in Latin America and the Caribbean*. Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/en/how-does-prospera-work-best-practices-implementation-conditional-cash-transfer-programs-latin>
- Energy Policy Tracker. (2020, November 25). *Indonesia*. <https://www.energypolicytracker.org/country/indonesia/>
- ET Bureau. (2020, June 30). *Petrol, diesel price hike didn't hit common man: Oil Minister Pradhan*. The Economic Times. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/petrol-diesel-price-hike-didnt-hit-common-man-oil-minister-pradhan/articleshow/76698346.cms?from=mdr>
- Fiscal Policy Agency. (2019). *Kajian: Kebijakan Subsidi Lpg Tabung 3kg Tepat Sasaran* [in Bahasa]. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>
- Gertler, P., Sheleg, O., Wolfram, C., & Fuchs, P. (2013). *Poverty, growth and the demand for energy-using assets* (Working paper 13-004). Stanford Institute for Economic Policy Research. <https://siepr.stanford.edu/research/publications/poverty-growth-and-demand-energy-using-assets>
- Global Subsidies Initiative. (2008, September 2). *Mexico's 2008 fuel subsidies higher than previously predicted*. <https://www.iisd.org/gsi/news-events/mexicos-2008-fuel-subsidies-higher-previously-predicted>
- Government of Indonesia. (2009). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)—Tahun 2008 (Audited)* [in Bahasa]. <https://www.kemenkeu.go.id/media/5990/lkpp-2008.pdf>
- Government of Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024* [in Bahasa]. Government of Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020>
- Haroon, A. (2020, April 17). *S&P Global Ratings revises Indonesia's outlook to negative*. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/s-p-global-ratings-revises-indonesia-s-outlook-to-negative-58081157>



- Hartomo, G. (2020, April 25). *Efek WFH, Konsumsi LPG 3 Kg Melonjak 11%* [in Bahasa]. <https://economy.okezone.com/read/2020/04/25/320/2204806/efek-wfh-konsumsi-lpg-3-kg-melonjak-11>
- IANS. (2020, September 1). *Govt eliminates cooking gas subsidy as Covid-19 turns oil market favourable*. Business Standard India. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-eliminates-cooking-gas-subsidy-as-covid-19-turns-oil-market-favourable-120090101003_1.html
- International Monetary Fund. (2020). *Policy responses to COVID19*. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
- Jowono, S. (2020, January 8). *Alternative policy for LPG subsidy in Indonesia*. Forum Kajian Pembangunan (FKP). <https://www.fkpindonesia.org/summary-report/fkp-hosted-by-bkf-and-prospera-alternative-policy-for-lpg-subsidy-in-indonesia>
- Johari, A. (2021, March 9). *India's poor were struggling to refill LPG cylinders. Now with record price hike, many have given up*. Scroll.In. <https://scroll.in/article/988886/india-s-poor-were-struggling-to-refill-lpg-cylinders-now-with-record-price-hike-many-have-given-up>
- Kitson, L., Merrill, L., Beaton, C., Sharma, S., McCarthy, A., Singh, C., Sharma, A., Parkh, J., Ohaeri, V., & Chowdhury, T. (2016). *Gender and fossil-fuel subsidy reform: Current status of research*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/gender-and-fossil-fuel-subsidy-reform-current-status-research>
- Komives, K., M. Johnson, T., Halpern, J., Luis Aburto, J., & R. Scott, J. (2009). *Residential electricity subsidies in Mexico: Exploring options for reform and for enhancing the impact on the poor*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7884-7>
- Kumar, S. (2020, September 21). *Despite misadventures, BJP continues to enjoy widespread popularity*. Mint. <https://www.livemint.com/news/india/despite-misadventures-bjp-continues-to-enjoy-widespread-popularity-11600673794201.html>
- Kusumawardhani, N., Hilman, R., Laan, T., Warda, N., & Nurbani, R. (2017). *Gender and fossil fuel subsidy reform: An audit of data on energy subsidies, energy use and gender in Indonesia*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/gender-and-fossil-fuel-subsidy-reform-audit-data-energy-subsidies-energy-use-and-0>
- Laan, T., Wooders, P., Chandra, A., Lang, K., & Liebert, T. (2012, November 5). *Reforming fossil-fuel subsidies to reduce waste and limit CO2 emissions while protecting the poor*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/reforming-fossil-fuel-subsidies-reduce-waste-and-limit-co2-emissions-while-protecting>
- Magazine, A. (2020, May 6). *Excise hiked on fuel, but retail prices will not rise*. Indian Express. <https://indianexpress.com/article/business/petrol-diesel-excise-duty-hiked-6395642/>
- Manduva, M. (2018, September 5). *Breaking down the petrol & diesel prices*. FACTLY. <https://factly.in/breaking-petrol-diesel-prices/>
- Maulana, H. (2018, April 16). *Tukar Tabung Gas Elpiji 3 Kg menjadi 5,5 Kg Kini Gratis* [in Bahasa]. KOMPAS.com. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/16/221400926/tukar-tabung-gas-elpiji-3-kg-menjadi-5-5-kg-kini-gratis>



- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020a). *Handbook of energy and economic statistics of Indonesia 2019*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2019.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020b). *Hingga Juni 2020, Kapasitas Pembangkit di Indonesia 71 GW* [in Bahasa]. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hingga-juni-2020-kapasitas-pembangkit-di-indonesia-71-gw>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020c). *Laporan Kinerja 2019* [in Bahasa]. Ministry of Energy and Mineral Resources. <https://migas.esdm.go.id/uploads/uploads/files/laporan-kinerja/200206---LAKIN-Ditjen-Migas---A4---rev-12--FINAL-printed-n-ttd- prestasi-v2--.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020d). *Laporan Kinerja Kementerian ESDM 2019* [in Bahasa]. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-kementerian-esdm-2019.pdf>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2020e). *Realisasi Produksi & Penjualan Batubara Tahun 2020* [in Bahasa]. <https://modi.minerba.esdm.go.id/pimpinan/produksiPenjualan?t=2020>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021* [in Bahasa]. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15868/buku-ii-nota-keuangan-beserta-rapbn-ta-2021.pdf>
- Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG). (2016). *The Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme: About*. <https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/The%20Pradhan%20Mantri%20Ujjwala%20Yojana%20%28PMUY%29%20Scheme.pdf>
- Ministry of Petroleum and Natural Gas. (2020a, September 3). *PAHAL-Direct Benefits Transfer for LPG (DBTL) Consumers Scheme: About the scheme*. <http://petroleum.nic.in/dbt/whatisdbtl.html>
- Ministry of Petroleum and Natural Gas. (2020b, September 3). *Pradhan Mantri Ujjwala Yojana*. <https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-ujjwala-yojana#tab=tab-1>
- Miranda, T. I. (2020). *Decision-making process used by middle-middle class families to access homeownership in Greater Jakarta, Indonesia* [PhD Thesis, University of Queensland]. <https://doi.org/10.14264/fc100b5>
- National Energy Council & Ministry of Energy and Mineral Resources. (forthcoming). *Grand Strategi Energi Nasional*.
- Nuryanto, W. (2021, February 5). *Harap-harap Cemas Pajak Indonesia* [in Bahasa]. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210205114341-79-602680/harap-harap-cemas-pajak-indonesia>
- Ordóñez-Barba, G., & Silva Hernández, A. (2019). *Progesa-Oportunidades-Prospera: Transformations, reaches and results of a paradigmatic program against poverty*. *Papeles de Población*, 25, 77–109.



- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Indonesia's effort to phase out and rationalise its fossil-fuel subsidies*. https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/G20%20peer%20review%20Indonesia_Final-v2.pdf
- Perusahaan Listrik Negara (PLN). (2019). *Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (PERSERO) 2019-2028* [in Bahasa]. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2c961-ruptl-pln-2019-2028.pdf
- Perusahaan Listrik Negara. (2020). *Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (PERSERO) 2019-2028* [in Bahasa]. Ministry of Energy and Mineral Resources and PLN. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2c961-ruptl-pln-2019-2028.pdf
- Petroleum Planning and Analysis Cell. (2020a). *Consumption of Petroleum Products*. https://www.ppac.gov.in/content/147_1_ConsumptionPetroleum.aspx
- Petroleum Planning and Analysis Cell. (2020b). *Prices: Crude Oil Price (Indian Basket)*. https://www.ppac.gov.in/content/149_1_PricesPetroleum.aspx
- Petroleum Planning and Analysis Cell. (2020c). *Retail selling prices of petrol/ and diesel in metro cities since 16.6.2017*. https://www.ppac.gov.in/WriteReadData/userfiles/file/PP_9_a_DailyPriceMSHSD_Metro_5_10_2020.pdf
- Petroleum Planning & Analysis Cell. (2021). *Subsidy/under-recovery on petroleum products*. https://www.ppac.gov.in/content/150_1_Subsidy.aspx
- Philemon, G. (2020, January 14). *Kementerian ESDM targetkan pelaksanaan subsidi tertutup LPG 3 kg di semester II 2020* [in Bahasa]. [kontan.co.id](http://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-targetkan-pelaksanaan-subsidi-tertutup-lpg-3-kg-di-semester-ii-2020). <http://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-targetkan-pelaksanaan-subsidi-tertutup-lpg-3-kg-di-semester-ii-2020>
- Pradiptyo, R., Susanto, A., Wirotomo, A., Adisasmita, A., & Beaton, C. (2016, May 23). *Financing development with fossil fuel subsidies: The reallocation of Indonesia's gasoline and diesel subsidies in 2015*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/financing-development-fossil-fuel-subsidies-reallocation-indonesias-gasoline-and>
- Prakoso, R. (2015, September 11). *Pertamina eyes middle class with 5.5Kg LPG canister*. Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/news/pertamina-eyes-middle-class-5-5kg-lpg-canister>
- Pranadji, D. K., Djamaludin, M. D., & Kiftiah, N. (2010). Analisis Perilaku Penggunaan LPG Pada Rumah Tangga di Kota Bogor (Behaviour Analysis of Using LPG in Bogor) [in Bahasa]. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 3(2), 172–183. <https://doi.org/10.24156/jikk.2010.3.2.172>
- Prasongko, D. (2017, December 2). *Ini Kelebihan Produk Baru Bright Gas, Elpiji Nonsubsidi 3 Kg*. *Tempo* [in Bahasa]. <https://bisnis.tempo.co/read/1038920/ini-kelebihan-produk-baru-bright-gas-elpiji-nonsubsidi-3-kg>
- Press Information Bureau (PIB). (2020a, April 12). *About 85 lakh PMUY beneficiaries have got the LPG cylinder in April, 2020*. <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1613563>



- Press Information Bureau. (2020b, July 1). *Cabinet approves extension of time limit for availing the benefits of 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana' for Ujjwala beneficiaries by three months w.e.f. 01.07.2020.* www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1637217
- Press Information Bureau. (2020c, May 13). *Finance Minister announce measures for relief and credit support related to businesses, especially MSMEs to support Indian economy's fight against COVID-19.* www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1623601
- Press Information Bureau. (2020d, March 26). *Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus.* <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1608345>
- Press Information Bureau. (2020e, August 31). *Estimates of gross domestic product for the first quarter (April–June) of 2020–21.* <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1650021>
- Press Information Bureau. (2020f, December 31). *Year End Review—2020—Ministry of Petroleum & Natural Gas.* www.pib.nic.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1685110
- Press Information Bureau. (2021, February 10). *Refilling of LPG cylinders.* <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1696712>
- Sachdev, A. (2020, August 10). *Truckers launch three-day 'transport lockdown' in MP.* *Cnbctv18.Com.* <https://www.cnbctv18.com/india/truckers-launch-three-day-transport-lockdown-in-mp-6596401.htm>
- Safitri, K. & Setiawan, S. (2020, October 31). *PLN Bikin Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi [in Bahasa].* *Kompas.com.* <https://money.kompas.com/read/2020/10/31/171400126/pln-bikin-gerakan-konversi-satu-juta-kompor-elpiji-ke-kompor-induksi>
- Sanchez, L., Echeverría, D., Wooders, P., Laan, T., Beaton, C., Sharma, S., Oharenko, Y., & Kuehne, K. (2018, December 18). *Improving and refocusing electricity subsidies: Options for optimization in Mexico.* International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/improving-and-refocusing-electricity-subsidies-options-optimization-mexico>
- Sanchez, P., Chavez, D., Bello, C., Morales, A., Bello, A., & Moreno, A. (2020, June 30). *Energy safety nets: Mexico case study.* Sustainable Energy for All. <https://www.seforall.org/publications/esn/mexico>
- Sanghera, T. (2020, April 2). *Hungry, desperate: India virus controls trap its migrant workers.* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/ajimpact/hungry-desperate-india-virus-controls-trap-migrant-workers-200402031123631.html>
- Secretaría de Energía. (2017). *Precios medios de energía eléctrica por tipo tarifa [in Spanish].* <https://datos.gob.mx/busca/dataset/precios-medios-de-energia-electrica-por-tipo-de-tarifa>
- SEGOB. (2008). *ACUERDO por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la población objetivo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2008 [in Spanish].* <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5030737>



- SEGOB. (2010a). *ACUERDO por el que se da a conocer el monto asignado y la distribución de la población objetivo del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2010* [in Spanish]. <https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5133363>
- SEGOB. (2010b, December 31). *ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades* [in Spanish]. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5173569&fecha=31/12/2010
- Sharma, S., Jain, P., Moerenhout, T., & Beaton, C. (2019). *How to target electricity and LPG subsidies in India: Step 1. Identifying policy options*. <https://www.iisd.org/library/how-target-electricity-and-lpg-subsidies-india-step-1>
- Sharma, M. (2020, July 14). *Centre to earn Rs 2.25 lakh cr more from new petrol, diesel taxes*. <https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/centre-to-earn-rs-225-lakh-cr-more-from-new-petrol-diesel-taxes/story/409846.html>
- Sharma, N. (2020, August 24). *No DBT for cylinders to 31 lakh women due to banking issues; 7.5 cr benefit*. *Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/no-dbt-for-cylinders-to-31-lakh-women-due-to-banking-issues-7-5-cr-benefit/articleshow/77712098.cms?from=mdr>
- Sharma, S., Moerenhout T., Aklin, M., & Bajaj, K. (2021). *How to target LPG subsidies in India: Step 2: Evaluating policy options in the State of Jharkhand*. International Institute for Sustainable Development.
- Shine, J., & Dhasmana, I. (2020, March 15). *Excise duty hike on petrol, diesel to add Rs 43,000 cr to govt revenue*. *Business Standard India*. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/excise-duty-hike-on-petrol-diesel-to-add-rs-43-000-cr-to-govt-revenue-120031500044_1.html
- Simatupang, T. (2020, January 15). *Barcode dan biometrik, dua skema pembelian gas melon 2020* [in Bahasa]. *Lokadata.ID*. <https://lokadata.id/artikel/barcode-dan-biometrik-dua-skema-pembelian-gas-melon-2020>
- Singh, B. P. (2020). *Impact of COVID-19 on rural economy in India*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3609973>
- Sistema de Información Energética. (n.d.). *Estadísticas Macroeconómicas Nacionales* [in Spanish]. <http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas>
- Sistema de Información Energética. (2010a). *LPG residential prices in force until December 2013*. <http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&subAction=applyOptions>
- Sistema de Información Energética. (2010b). *Pétroleos Mexicanos. Estructura de precios. Precio ponderado nacional* [in Spanish]. <http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cveca=PMXE2C17>
- Surabhi. (2018, February 18). *Half-baked fuel deregulation*. <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/from-the-viewsroom/fuel-deregulation-in-india-not-benefitting-consumers/article22790702.ece>



- The Hindu. (2020, July 1). *GST revenues fall 41% in first quarter*. <https://www.thehindu.com/business/Economy/gst-revenue-collections-in-june-at-90917-crore/article31960842.ece>
- The New Indian Express. (2020, June 29). *Government using oil money for welfare of poor, not RGF: BJP's attack on Congress*. New Indian Express. <https://www.newindianexpress.com/nation/2020/jun/29/government-using-oil-money-for-welfare-of-poor-not-rgf-bjps-attack-on-congress-2163042.html>
- The Times of India. (2020, June 29). *Congress holds nationwide protests against fuel price hike; Sonia, Rahul slam Centre*. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/congress-holds-nationwide-protests-against-fuel-price-hike-sonia-rahul-slam-centre/articleshow/76690261.cms>
- Toft, L., Beaton, C., & Lontoh, L. (2016, August 2). *International experiences with LPG subsidy reform*. International Institute for Sustainable Development. <https://www.iisd.org/publications/international-experiences-lpg-subsidy-reform>
- U.S. Energy Information Administration. (2020). *Country analysis executive summary: India*. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/India/india.pdf
- Varadhan, A. A., Sudarshan. (2020, March 14). *India increases fuel taxes in a bid to shore up revenue*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-india-economy-fuel-idUSKBN21108I>
- Villarreal, M. A. (2010, September 9). *The Mexican economy after the global financial crisis*. UNT Digital Library; Library of Congress. <https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc491234/>
- Wicaksono, P. E. (2019, June 21). *Penyaluran Subsidi LPG di 2020 Bakal Gunakan Kartu* [in Bahasa]. [liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3994828/penyaluran-subsidi-lpg-di-2020-bakal-gunakan-kartu](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3994828/penyaluran-subsidi-lpg-di-2020-bakal-gunakan-kartu)
- World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversals of fortune*. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf>

©2021 The International Institute for Sustainable Development
Published by the International Institute for Sustainable Development

Head Office

111 Lombard Avenue, Suite 325
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 0T4

Tel: +1 (204) 958-7700

Website: www.iisd.org

Twitter: @IISD_news

Global Subsidies Initiative

International Environment House 2
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine
Geneva, Switzerland

Tel: +41 22 917-8683

Website: www.iisd.org/gsi

Twitter: @globalsubsidies

